



PANDUAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)



**UNIVERSITAS PGRI
MAHADEWA INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Pendidikan disiapkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dapat adaptif sesuai zamannya. Disadari bahwa pendidikan senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) ke depan dihadapkan untuk menuju *World Class University* yang berbasis kepada *global entrepreneur*. Hal ini berimplikasi kepada kesiapan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk senantiasa merespon berbagai dinamika preferensi *stakeholders*. Perubahan berbagai dinamika *preferensi* menyentuh berbagai aspek pengelolaan pendidikan, seperti arah kebijakan pendidikan tinggi, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan, kejelasan rumusan kompetensi lulusan yang dapat memenuhi tuntutan *stakeholders*, isi pembelajaran, sistematika kurikulum, dan model pembelajaran inovatif yang dapat merangsang minat belajar pembelajar. Pemetaan dan penetapan pendidikan yang berorientasi kepada tuntutan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) menjadi tren yang patut dikembangkan untuk menghasilkan SDM yang adaptif, kompetitif, unggul dan berkarakter yang sesuai dengan tuntutan Kompetensi Abad ke 21.

Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengamanatkan adanya empat kebijakan yang patut diperhatikan terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yaitu (1) kemudahan pembukaan program studi baru, (2) perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, (3) perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menjadikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam menata isi pembelajaran dengan mendesain sistem kurikulum yang memberi peluang bagi lulusan untuk dapat melakukan tindakan yang produktif di akhir studinya. Untuk menyiapkan sistematika kurikulum merdeka belajar kampus merdeka dengan memberikan hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar program studi selama 3 semester dengan pemetaan satu semester diperoleh di luar prodi dalam perguruan tinggi yang sama dan dua semester di luar prodi pada perguruan tinggi yang berbeda dan di luar perguruan tinggi. Sebagai kebijakan awal tentu disadari dalam pelaksanaannya masih memerlukan kebijaksanaan terkait dengan kejelasan prodi dan perguruan tinggi mitra kerjasama, masalah pembiayaan, dan kepastian sebaran mata kuliah

yang harus ditempuh mahasiswa khususnya yang ada di luar prodi dan perguruan tinggi berbeda, sehingga tidak menghambat penyelesaian dan masa studi.

Denpasar, Agustus 2024

SAMBUTAN REKTOR

Perguruan tinggi merupakan lembaga yang paling terpengaruh oleh dinamika perubahan tuntutan di masyarakat, dunia usaha, dan industri. Orientasi perguruan tinggi yang berfokus pada upaya menghasilkan lulusan yang siap bersaing mengharuskan adanya adaptabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulumnya. Para ahli menyebut era revolusi 4.0 dengan istilah “*sudeen shift*”, yaitu perpindahan yang cepat dan tiba-tiba, terutama dari dunia konvensional ke dunia serba digital. Lahirnya *e-commerce*, *finansial technology*, *egovernance*, *creative economy* digital, dan lainnya semakin mengharuskan perubahan substansi kurikulum yang lebih adaptif sesuai dengan minat, kebutuhan, dan ekspektasi mahasiswa. Penyelenggaraan pendidikan harus lebih mengutamakan tata kelola yang memudahkan kerja sama antar universitas, dan institusi lain termasuk perindustrian. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih banyak memperoleh pengalaman belajar, tidak hanya di kampusnya sendiri, tetapi juga di kampus yang berbeda, bahkan di lembaga di luarkampus. Tata kelola tersebut juga menjadi dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang harus direspons oleh semua perguruan tinggi, termasuk oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) dengan melakukan penyesuaian kurikulum sesuai tuntutan dan kebijakan yang berlaku. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar yang pada strata perguruan tinggi disebut dengan Kampus Merdeka. Esensi dari kedua kebijakan tersebut adalah memberikan pilihan ruang belajar yang lebih luas kepada mahasiswa agar dapat memperoleh pengalaman belajar serta dapat mengembangkan, mengasah, memperluas, dan memperdalam kompetensi di luar kampus sendiri, selain untuk penguatan kelembagaan yang lebih profesional. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai Badan Layanan Umum menyikapi kebijakan tersebut dengan melakukan penyesuaian Kurikulum terhadap Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 2021.

Denpasar, Agustus 2024

Rektor



UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

Alamat: Jalan Seroja No. 57, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara,
Kota Denpasar, Bali. Telp. 08113888814

Surel: info@mahadewa.ac.id Website : www.mahadewa.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 1168/UPMI/VII/2024

**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- b. Bahwa untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi;
- c. Berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 Tentang pendirian, perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi Negeri dan pendirian, perubahan dan pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta;

8. Permendikbudristek No. 52 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Pedoman Akademik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Nomor 1132/UPMI/VII/2024 tentang Penetapan Kurikulum Outcome Based Education Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 2024
11. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengesahkan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan adanya kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Tanggal 24 Juli 2024

Rektor



Prof. Dr., Drs. I Made Suarta, S.H., M.Hum

NIP : 19621025 199102 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
SAMBUTAN REKTOR.....	iv
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Landasn Implementasi MBKM	13
1. Landasan Filosofis.....	13
2. Landasan Hukum.....	14
1.3 Tujuan.....	15
1.4 Prinsip Pelaksanaan	16
1.5 Hasil Yang Diharapkan	17
BAB II	19
2.1 Mekanisme MBKM Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI).....	19
2.1.2 Perkuliahan Pada Prodi Berbeda di Lingkungan UPMI.....	22
a. Tanggung Jawab Para Pihak Terkait	24
b. Penilaian Hasil Belajar	25
c. Biaya.....	25
2.1.3 Mekanisme Kuliah di Prodi yang Sama di Luar UPMI.....	25
2.1.4 Mekanisme Kuliah di Prodi yang Berbeda di Luar UPMI	26
2.2 Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.....	27
2.2.1 Tahap Persiapan.....	27
2.2.2 Tahap Pelaksanaan	31
A. Pertukaran Mahasiswa	35
B. Magang /Praktek Kerja	39
1. Monitoring Kegiatan Pembelajaran	41
2. Evaluasi.....	42

C. Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan	44
D. Penelitian / Riset.....	48
E. Proyek Kemanusiaan.....	51
F. Kegiatan Wira Usaha	53
G. Studi/Proyek Independen.....	56
H. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	59
BAB III	82
3.1 Standar Mutu Akademik Penyelenggaraan MBKM UPML.....	82
1. Kebijakan dan Manual Mutu	83
2. Standar Manual Mutu	84
3.2 Monitoring dan Evaluasi	88
BAB IV PENUTUP.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Desain Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.....	9
Tabel 2. Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama	27
Tabel 3. Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda.....	27
Tabel 4. Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda	28
Tabel 5. Kriteria Penilaian Magang	34
Tabel 6. Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (Bentuk Blended).....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pola Penempatan Semester Pada Kurikulum MBKM Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	11
Gambar 2. Kuliah di Prodi Berbeda di Lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	13
Gambar 3 Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.....	23
Gambar 4. Alur Mahasiswa Melakukan Program Pertukaran Pelajar	26
Gambar 5. Alur Mahasiswa Melakukan Program Magang/Praktek Kerja	32
Gambar 6. Alur Mahasiswa Melakukan Program Mahasiswa Mengajar di Sekolah	38
Gambar 7. Alur Mahasiswa Melakukan Program Penelitian.....	43
Gambar 8. Alur Mahasiswa Melakukan Program Proyek Kemanusiaan.....	45
Gambar 9. Alur Mahasiswa Melakukan Program Wirausaha.....	48
Gambar 10. Alur Mahasiswa Melakukan Program Proyek/Studi Independent	50
Gambar 11. Alur Mahasiswa Melakukan Program Proyek Desa	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini, telah membawa perubahan yang sangat pesat pula dalam berbagai aspek kehidupan. Pekerjaan dan cara kita bekerja berubah, banyak lapangan pekerjaan hilang, sementara berbagai jenis pekerjaan baru bermunculan. Perubahan ekonomi, sosial, dan budaya juga terjadi dengan laju yang tinggi. Dalam masa yang sangat dinamis ini, perguruan tinggi harus merespon secara cepat dan tepat. Diperlukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan Pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang unggul. Generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa tercerabut dari akar budayanya.

Kegiatan Pendidikan merupakan proses transformasi ilmu pengetahuan, teknologi dan nilai-nilai kehidupan agar senantiasa mahasiswa dapat berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat lingkungannya. Untuk itu sistem pendidikan senantiasa berkembang maju menuju progres yang konstruktif. Mahasiswa hendaknya mendapat pelayanan untuk menumbuhkembangkan potensinya sesuai tuntutan zaman. Era sekarang ini ada di era Revolusi Industri 4.0, ditandai oleh adanya teknologi komunikasi dan informasi sebagai penciri utama kualitas dan kompetensi sumber daya. Hal yang menarik dalam berbagai aspek kehidupan Teknologi informasi telah mengambil alih banyak pekerjaan dan tugas manusia.

Pada abad ke-21 ini, Sumber Daya Manusia (SDM) tidak lagi dituntut pada keterampilan dan nilai-nilai yang bersifat konservatif mengedepankan tindakan yang prosedural, akan tetapi kecerdasan, kecekatan dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi sebagai penciri utama di era milenial. Dengan kata lain tuntutan untuk dapat menggunakan keterampilan berpikir kritis, positif, kreatif, komunikatif, kolaboratif dalam bekerja dan bekerjasama di dalam pemecahan masalah sebagai keunggulan SDM ke depan. Untuk itu karakteristik SDM di era teknologi abad ke-21 didasarkan pada kecakapan terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap, termasuk penguasaan *Information and Communication Technology* (ICT).

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan

adalah pemetaan terhadap tenaga pengajar yang berasal dari praktisi tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa terdapat empat amanah kebijakan terkait Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yang meliputi: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal. merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks pembelajaran di luar program studi selama tiga semester yang dapat diambil dari luar program studi dalam satu Perguruan Tinggi (PT) dan/atau di luar PT. Dalam kaitan dengan hal di atas itulah Universitas PGRI Mahadewa Indonesia merestrukturisasi kurikulumnya (Kurikulum 2019) menjadi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (Kurikulum MBKM UPMI 2021). Kurikulum MBKM Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 2021 menggunakan Kurikulum UPMI 2019

sebagai based line yang telah disusun berbasis pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI)

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Kecermatan dan ketepatan dalam menyiapkan SDM dengan karakter seperti itu, kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagai wahana yang sangat tepat, agar mahasiswa dapat mengarahkan dirinya secara otonom, kreatif dan produktif dalam mengembangkan kompetensinya. Untuk tujuan tersebut sangatlah penting keberadaan Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bagi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI).

1.2 Landasan Implementasi MBKM

1. Landasan Filosofis

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berakar pada filosofi dan teori-teori pendidikan seperti ajaran Ki Hajar Dewantara, teori belajar konstruktivisme dan progresivisme. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan didasarkan pada asas kemerdekaan, dimana manusia diberi kebebasan oleh tuhan untuk mengatur kehidupannya sesuai dengan nilai, norma dan aturan yang hidup pada masyarakatnya. Hal ini selaras dengan Undang-undang No. 12 tahun 2012 pasal 1 ayat 1 yang mengatakan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Beberapa pandangan Ki Hajar Dewantara masih relevan dengan kondisi saat ini yaitu bagaimana membentuk manusia merdeka. Ajaran Ki Hajar Dewantara adalah :

1. Pengaruh pengajaran pada umumnya adalah memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan.
2. Manusia merdeka itu manusia yang hidup lahir batin tidak bergantung pada orang lain, bersandar pada kekuatannya sendiri.

3. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk pri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota dari persatuan (rakyat).

Teori belajar konstruktivisme berdasarkan gagasan bahwa mahasiswa adalah peserta aktif dalam pembelajaran. Pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman belajar kemudian merelisasikan dan menggabungkan ide-ide baru dengan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. Mahasiswa merencanakan dan memilih pengetahuan sesuai dengan minatnya.

Teori progresivisme pendidikan menekankan pada kemanfaatan pada kehidupan nyata. Bagi teori ini, mahasiswa perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal agar mampu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan menurut teori progresivisme bersifat fleksibel mendorong mahasiswa untuk bersikap terbuka, memilimi rasa ingin tahu untuk memperoleh pengetahuan. Relevan dengan pendidikan dewasa ini dan masa yang akan datang maka pendidikan di perguruan tinggi hendaknya fleksibel sesuai dengan bakat dan potensi mahasiswa.

2. Landasan Hukum

Landasan Hukum pelaksanaan MBKM diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.
10. Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
11. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Jakarta: Kemendikbudristek
12. Permendikbudristed No. 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
13. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Tahun 2024. Jakarta: Kemendikbudristek
14. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
15. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). (2023). Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE). Jakarta: BAN-PT

1.3 Tujuan

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia baik *soft skill* maupun *hard skill* agar siap dan relevan dengan kebutuhan DUDIKA baik masa kini maupun masa yang akan datang, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan menuju bangsa yang unggul dan berkarakter. Program-program *experiential learning* yang pelksibel diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan semua potensi dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya.

1.4 Prinsip Pelaksanaan

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) bertitik tolak pada prinsip berikut ini:

1. Capaian Profil Lulusan.

Bentuk pembelajaran yang diberikan pada program studi di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagaimana lazim telah dilaksanakan dalam bentuk kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum, magang, bakti sosial (baksos), bina desa, KKN Tematik, PKL dan lainnya dilakukan dalam upaya mewujudkan capaian profil lulusan yang telah dirumuskan oleh masing-masing program studi.

2. Capaian Kompetensi Lulusan secara Holistik.

Kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa di dalam dan di luar kampus diarahkan untuk dapat memberikan pengalaman belajar yang beragam untuk pencapaian kompetensi secara utuh dengan berorientasi pada capaian kompetensi yang berbasis pada *team-based project*, *case method* dan *contextual learning* melalui pemanfaatan sumber belajar yang beragam (*multy resources*)

3. Kolaborasi.

Kerja sama dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan antara Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) dengan mitra kerjasama bersifat saling menguntungkan berbasis pada prinsip kolaborasi, yakni sama-sama membangun lulusan berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan *stakeholder* melalui aktivitas kerja sama kelembagaan dengan institusi, organisasi dan dunia usaha dan dunia industri.

4. Kemandirian Belajar (*Self-Regulated Learning*).

Era digital 4.0 menuntut pembelajaran lebih mandiri bagi mahasiswa yang didukung oleh keberadaan sarana *Information and Communication Technology* (ICT) sehingga berpeluang untuk belajar lebih intens melakukan pembelajaran jarak jauh. Kedepan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia upaya menguatkan ICT dalam rangka pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka menjadi kebutuhan yang sangat vital dengan menggunakan sistem pembelajaran (*platform*) LMS yang semakin intensif digunakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai perwujudan *smart campus*.

1.5 Hasil Yang Diharapkan

Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) diharapkan dapat menghasilkan:

1. Capaian lulusan yang berkualitas dengan penguasaan kompetensi yang holistik antara kompetensi nonteknis (*softskills*) dan teknis (*hardskills*), sehingga mampu bekerja dengan profesional sesuai disiplin ilmu yang dikuasainya;
2. Mencetak lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dan aktual dengan tuntutan masyarakat, khususnya dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
3. karakteristik lulusan berkarakter dicirikan oleh sikap, watak dan pola pikir kritis, inovatif, dan berbudaya global dalam menyikapi perkembangan, dan tuntutan masyarakat dan dunia kerja, sehingga mereka mudah beradaptasi dan menangkap peluang untuk masa depannya;
4. Kemampuan lulusan yang dapat bekerja dan bekerja sama dalam pekerjaan (*collaboration work*), sharing dalam kelompok dan kemampuan managerial dengan kemampuan komunikasi global.
5. menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, kreatif, tangguh dan senantiasa mengapdit pengalaman melalui konsep pembelajaran sepanjang hayat (*long lifeeducation*).
6. Mahasiswa memiliki kegiatan di luar kampus, mulai dari pertukaran pelajar, magang, mengajar, riset, berwirausaha, dan proyek desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
7. Memiliki dosen yang berkegiatan di luar kampus, dengan mencari pengalaman di industri atau berkegiatan di kampus lain.
8. Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi intenasional melalui hasil-hasil penelitian dan pengabdian yang buat dan dimiliki oleh dosen-dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
9. Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia dalam mengembangkan kurikulum, kegaitan magang dan penyerapan lulusan

Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini dapat memberi arahan agar pengelola program studi dan pelaksana program studi di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dapat melakukan tindakan lanjut dalam hal:

1. Memetakan mata kuliah pada program studi masing-masing sebanyak maksimal 20 sks

untuk ditawarkan pada prodi lain di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia termasuk bagi mahasiswa asing;

2. Mensosialisasikan kepada dosen dan mahasiswanya terkait Merdeka Belajar- Kampus Merdeka dengan merujuk pada pedoman ini;
3. Mengidentifikasi lembaga-lembaga di luar prodi yang selaras dengan bidang keilmuan prodi sebagai mitra kerja sama untuk tempat mahasiswa melakukan aktivitas perkuliahan tiga semester di luar prodinya, baik perguruan dalam maupun luar negeri, ataupun dengan dunia usaha, dunia industri dan lembaga swadaya masyarakat di dalam ataupun luar negeri.

BAB II

MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

2.1 Mekanisme MBKM Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

2.1.1 Desain Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UPMI

Sesuai dengan Standar Mutu Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) yang berdasar pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), maka desain pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia diarahkan untuk memberikan layanan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagai hak mahasiswa untuk memperolehnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan mutu Universitas PGRI Mahadewa Indonesia bahwa menyelenggarakan pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia berbasis kepuasan pemangku kepentingan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, maka desain pelaksanaan kurikulum untuk memenuhi hak mahasiswa tersebut dikembangkan sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.1: Desain Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

DESAIN KURIKULUM MBKM UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA		
Minimal 4 Semester	Maksimal 1 Semester	Maksimal 2 Semester
Paling sedikit 4 semester dan paling lama 10 semester mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam prodi	Paling lama 1 semester (setara dengan 20 sks) mengikuti pembelajaran di luar prodi di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	Paling lama 2 semester (setara dengan 40 sks) mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah inti prodi	Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang sama yang ditawarkan oleh prodi lain	Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di prodi yang sama ataupun berbeda di luar kampus Universitas PGRI Mahadewa

	pada fakultas/prodi di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	Indonesia dan memilih 1 dari 8 kegiatan yang telah ditentukan
Keilmuan Inti Prodi	Pengayaan dan Perluasan	Pendalaman dan Penguatan
Capaian Pembelajaran Lulusan dan Profil Lulusan Berbasis <i>Information and Communication Technology (ICT)</i>		

Keterangan:

- 1) Mahasiswa difasilitasi untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri, minimal selama 4 semester atau setara dengan 80 sks atau lebih dan paling lama selama 10 semester. Mata kuliah yang diambil pada program studi sendiri itu adalah mata kuliah inti yang wajib diambil sebagai mata kuliah disiplin ilmu program studi yang secara langsung akan mendukung pada pencapaian profil utama lulusan program studi dan atau mengambil mata kuliah lain yang diwajibkan.
- 2) Mahasiswa difasilitasi untuk dapat mengambil mata kuliah pada program studi yang lain di fakultas/prodi apapun yang ada di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, baik program studi yang ada di kampus Universitas PGRI Mahadewa Indonesia selama satu semester atau setara dengan 20 sks. Mata kuliah yang diambil pada program studi lain ini ditujukan selain untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran Profil Utama program studi, juga untuk memberikan perluasan atau pengayaan kompetensi yang ingin dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masa depan, minat dan bakat yang dimilikinya.
- 3) Mahasiswa difasilitasi mengikuti perkuliahan paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama atau program studi yang berbeda di luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan atau melaksanakan salah satu dari 8 kegiatan yang telah ditentukan. Mata kuliah yang diambil pada program studi yang sama dan program studi yang berbeda ditujukan untuk pendalaman dan penguatan keilmuan, kompetensi dan profil utama prodi serta memberi pengalaman belajar yang lebih nyata di masyarakat dan lapangan pekerjaan.

Pola Penempatan Semester Pada Kurikulum MBKM Universitas PGRI MahadewaIndonesia



Gambar 2.1. Pola Penempatan Semester Pada Kurikulum
MBKM Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Berdasarkan gambar di atas, pola penempatan semester pada kurikulum MBKM Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mata kuliah yang menunjang Kompetensi Inti (Profil Utama dan Capaian Pembelajaran Lulusan) prodi diletakkan pada empat semester awal, yakni mulai dari semester 1 sampai dengan semester ke-4 dan semester ke-8 untuk penulisan tugas akhir. Pengambilan mata kuliah selama 4 semester nantinya akan dijadikan syarat bahwa mahasiswa bisa mengambil haknya untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dalam PT dan luar PT.
2. Pada akhir semester genap (semester ke-2 dan semester ke-4), program studi dapat menawarkan semester antara, masing-masing sebanyak 9 sks sehingga keseluruhannya berjumlah 18 sks. Hal ini akan memberikan fasilitas bagi percepatan studi mahasiswa

setidaknya setara dengan satu semester.

3. Pada semester ke-5 program studi dapat memfasilitasi mahasiswa yang berminat untuk menambah kompetensi tambahan melalui perkuliahan yang ada pada program studi yang berbeda di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Mahasiswa dapat dengan suka rela memilih mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh masing-masing program studi, yakni sebanyak 20 sks.
4. Pada semester ke-6 dan semester ke-7, program studi dapat memberikan fasilitas sebanyak 40 sks kepada mahasiswa untuk melakukan perkuliahan pada program studi yang berbeda di luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan/ atau melakukan salah satu dari 8 kegiatan yang telah ditentukan di berbagai tempat sesuai dengan yang diajukan mahasiswa dan atas izin dan kesepakatan dengan pimpinan program studi. Pada kegiatan ini mahasiswa dianjurkan memanfaatkan waktu yang tersedia dengan menyusun dan menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang dipersyaratkan untuk menyelesaikan studinya.

2.1.2 Perkuliahan Pada Prodi Berbeda di Lingkungan UPMI

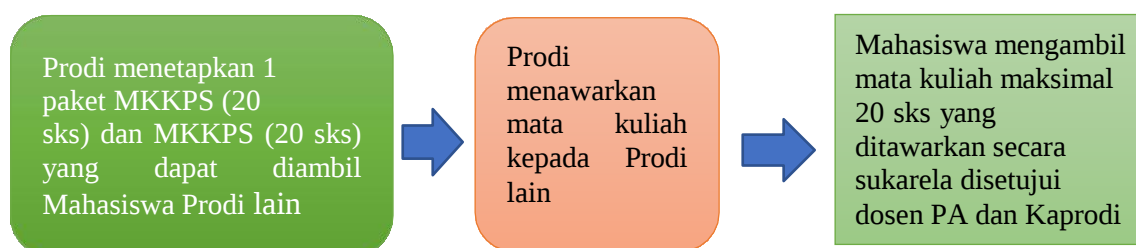
Sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka perkuliahan dilakukan di luar program studi di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia selama 1 (satu) semester. Sehingga mahasiswa diberikan fasilitas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran disamping di program studi sendiri sesuai pilihan sejak sebagai mahasiswa baru di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, pada Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mahasiswa difasilitasi untuk dapat mengikuti perkuliahan pada program studi yang lain yang ada di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI).

Kegiatan perkuliahan di luar program studi pada kampus sendiri dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar untuk memperkaya dan memperluas kompetensi utama sesuai dengan Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada program studi sebelumnya. Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia telah dilakukan peninjauan semenjak adanya kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dari

kurikulum berbasis KKNI. Setiap program studi harus membuat 2 paket sebaran mata kuliah yang disediakan bagi mahasiswa 1 paket mata kuliah bagi mahasiswa yang tidak mengambil haknya atau kuliah di dalam prodi yang sama karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh kaprodi dan/atau mahasiswa tidak mengambil haknya atau memilih untuk tetap kuliah di dalam prodi yang sama. Dengan demikian, pemenuhan pemerolehan 20 sks mengikuti kuliah pada program yang berbeda di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dapat direalisasikan, betapapun belum seluruh Program studi dapat melaksanakan kebijakan ini secara utuh.

Selanjutnya sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi lain di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia ditentukan sebagai berikut:

1. Terdaftar pada program studi tertentu di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. Telah lulus mata kuliah khusus program studi (MKKPS) sebanyak 80% atau setara dengan 116 sks;
3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari pembimbing akademik dan ketua Program studi.



Gambar 2.2 Kuliah di Prodi Berbeda di Lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Bagi program studi yang belum menyusun dan menetapkan mata kuliah pilihan, diwajibkan untuk segera menetapkan kelompok MKKPS (20 sks) yang dapat diambil oleh mahasiswa program studi yang bersangkutan dan/atau secara sukarela dapat

diambil oleh mahasiswa program studi lain yang ada di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

2. Program studi menawarkan secara terbuka mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada poin 1 yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studi yang ada di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
3. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan tersebut secara sukarela atas bimbingan dosen pembimbing akademik dan atas rekomendasi dari ketua program studi paling banyak 20 sks dan atau sesuai dengan ketentuan persyaratan maksimal pengambilan sks yang telah ditetapkan.

a. Tanggung Jawab Para Pihak Terkait

Pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan perkuliahan di luar program studi dalam Universitas adalah: (1) WR 1, (2) WD 1, (3) Program studi asal mahasiswa dan program studi yang dituju, (4) Pembimbing Akademik, dan (5) Mahasiswa. Rincian tanggung jawab pihak terkait dalam kegiatan perkuliahan di luar program studi dalam Universitas seperti berikut.

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan kerjasama (WR 1) bertanggungjawab dalam menyiapkan kebijakan tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- 2) Wakil Dekan bidang akademik membantu Dekan bertanggungjawab dalam mengkoordinir dan mengarahkan prodi untuk menyiapkan mata kuliah (MK) yang ditawarkan serta melaksanakannya.
- 3) Program studi asal mahasiswa dan program studi yang dituju. Prodi asal mahasiswa memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk menelaah kesesuaian matakuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dan atau kegiatan program MBKM dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) prodi. Sementara itu, prodi yang dituju memiliki tanggungjawab dalam menyiapkan dan melaksanakan kualitas pembelajaran yang baik serta memberikan penilaian akhir sebagai hasil belajarmahasiswa di dalam prodi tersebut
- 4) Pembimbing Akademik berkewajiban membimbing mahasiswa agar mampu memilih dan mengikuti perkuliahan yang mampu mendukung keahlian utamanya.

b. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian dalam pelaksanaan kegiatan belajar satu semester di luar prodi dalam UPMI mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan belajar di luar prodi dalam UPMI, setidaknya sebagai berikut:

- 1) kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan perkuliahan;
- 2) kedisiplinan dan tanggung jawab dalam perkuliahan dan dalam melaksanakan tugas-tugas;
- 3) Attitude/sikap;
- 4) kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- 5) kemampuan membuat laporan.

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, kegiatan belajar satu semester di luar prodi dalam UPMI dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan padaakhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Dosen pengampu dan dosen pembimbing kegiatan belajar satu semester di luar prodi dalamUPMI melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara mengunggah nilai ke *system edu-edu*.

c. Biaya

Biaya yang ditimbulkan oleh pengambilan mata kuliah (MK) di luar prodi dalam Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) dibebankan pada Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa yang telah dibayarkan. Jika biaya yang ditimbulkan melebihi Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah dibayarkan maka biaya tersebut menjadi tanggungan mahasiswa sendiri.

2.1.3 Mekanisme Kuliah di Prodi yang Sama di Luar UPMI

Program studi di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam melaksanakan kebijakan Belajar Merdeka-Kampus Merdeka wajib untuk memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang sama yang adadi luar Universitas

PGRI Mahadewa Indonesia, baik perkuliahan pada program studi yang sama di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia peluang untuk dapat mengikuti perkuliahan pada program studi yang sama di luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sangat tinggi mengingat mitra kerjasama Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan perguruan tinggi di dalam kampus.

Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa agar dapat mengikuti program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di program studi yang sama di luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, sebagai berikut:

1. Terdaftar pada program studi tertentu di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan masih aktif, serta tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. Telah menempuh dan lulus mata kuliah minimal selama dua semester atau setara dengan 40 sks;
3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi.

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Program studi telah melakukan *joint curriculum* dengan program studi yang sama atau yang linear yang ada di perguruan tinggi lain, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang tertuang dalam MoU atau Nota Kesepahaman.
2. Program studi telah menetapkan mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi lain dan telah sepakat untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat.
3. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua prodi yang bersepakat dan pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan multi model baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam berbagai aplikasi jaringan lainnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman

2.1.4 Mekanisme Kuliah di Prodi yang Berbeda di Luar UPMI

Kemungkinan lain yang disediakan dalam model pembelajaran sesuai kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka seperti: *Student Exchange*, Magang (*short course*), Pertukaran Mahasiswa merdeka (PMM) dan studi aplikasi (*applied study*). Dalam hal ini wajib program studi memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang

berbeda di perguruan tinggi lain. Program MBKM seperti ini tentunya tetap mempertimbangkan profil dan capaian pembelajaran lulusan program studi sebelumnya, baik yang utama maupun yang tambahan.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, yaitu:

1. Terdaftar pada program studi tertentu di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 80% atau setara dengan 115 sks;
3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi.

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Program studi melakukan kerja sama dengan program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang tertuang dalam Memorandum Kesepahaman (MoU) atau Memorandum Kesepakatan (MoA). MoA sekurang-kurangnya menyepakati untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua program studi; melaksanakan pembelajaran dengan multi-model, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya, serta pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari adanya kesepakatan.
2. Program studi yang melakukan MoA setidaknya memiliki peringkat akreditasi yang setara, baik PTN maupun PTS.
3. Program studi menetapkan mata kuliah yang relevan yang mendukung Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan dan mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat.
4. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua program studi yang bersepakat melalui serah terima mahasiswa secara daring atau luring sesuai dengan yang telah disepakati dalam MoU atau MoA.

2.2 Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

2.2.1 Tahap Persiapan

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) menyikapi kebijakan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pengelola program studi di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Edaran yang menginstruksikan agar para pengelola program studi melakukan tindakan proaktif berupa koordinasi, konsultasi, dan mengikuti seluruh even yang membahas kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan kolega pengelola program studi sejenis, pihak konsorsium bidang keilmuan. Secara aktif mengikuti kegiatan webinar dalam skala nasional untuk menyerap gagasan terutama mengenai sistematika kurikulum dan berbagai kebijakan strategis menyangkut kemerdekaan mahasiswa dalam pembelajaran.

Mengacu pada Permendikbudristekdikti No 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menyusun kebijakan yaitu melakukan restrukturisasi kurikulum untuk memfasilitasi hak mahasiswa seperti diuraikan di atas. Hasil restrukturisasi kurikulum tersebut melahirkan kurikulum yang diberi nama Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2024.

Peranan program studi dalam restrukturisasi kurikulum tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Program studi menyusun kurikulum program studi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menentukan visi misi program studi,
 - b) profil lulusan,
 - c) menetapkan capaian pembelajaran lulusan (CPL)
 - d) menetapkan jumlah sks yang diambil mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana yaitu antara 144 sampai dengan 152 sks,
 - e) menentukan matakuliah: wajib umum, inti keprofesian, IPTEK Pendukung, penciiri prodi dan,
 - f) menentukan jumlah sks yang dapat diambil di luar prodi di dalam perguruan tinggi, serta jumlah sks yang diambil di luar perguruan tinggi,
- 2) Menentukan mata kuliah mata kuliah bagi mahasiswa:
 - a) Mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah di luar program studi dalam universitas maupun di luar perguruan tinggi, dan
 - b) Menentukan mata kuliah bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar program studi dalam universitas maupun di luar perguruan tinggi.
- 3) Sesuai dengan kebijakan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI), program studi

menetapkan model Proses Belajar “Kampus Merdeka” (Model Percepatan) yaitu:

- a) Semester 1 hingga 4 pembelajaran di Prodi
 - b) Diantara semester 2-3, 4-5, dan 6-7 dapat diselenggarakan semester antara yang sifatnya optional
 - c) Semester 5 pembelajaran di Luar Prodi dalam PT setara 20 sks sesuai dengan minat dan bakat atau keterampilan yang dibutuhkan oleh mahasiswa
 - d) Semester 6 dan 7 mahasiswa magang di luar PT, masing-masing semesterbebananya setara 20 sks
 - e) Semester 8 (sejumlah 6 sks) pembelajaran di Prodi terkait dengan Tugas Akhir dan penyelesaian studi
- 4) Program studi menyusun penawaran matakuliah per semester yang diseteorkan pada bagian akademik fakultas untuk diteruskan ke pusat teknologi informasi UPMI.
 - 5) Prgram studi melakukan kajian kurikulum dan atau capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada program studi lain di lingkungan UPMI yang relevan dengan program studinya, dan pada prodi yang sama dan berbeda di luar UPMI.
 - 6) Program studi melakukan penjajagan terhadap lembaga dan lokasi seperti pada poindi atas untuk menentukan kesesuaian kegiatannya dengan profil lulusan dan atau CPL program studinya.
 - 7) Program studi mengajukan daftar nama matakulian dan daftar lembaga lokasi kegiatan program MBKM kepada Lembaga Pengembangan Pembelajaran Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPPM) UPMI yang diketahui oleh dekan.
 - 8) LPPPM Universitas PGRI Mahadewa Indonesia melakukan verifikasi matakuliah dan lembaga yang diajukan oleh program studi
 - 9) LPPPM mengajukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama lembaga atau perguruan tinggi yang diusulkan oleh program studi untuk ditindak lanjuti membuat dokumen kerjasama (MoU).

Pada tahap persiapan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Pengelola program studi membentuk Tim Penyusun Kurikulum untuk menyusun pedoman pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dikoordinasikan oleh

Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran.

2. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran melakukan sosialisasi kepada fakultas, program studi, dan Biro Administrasi Akademik dan Pengembangan Sistem Informasi (BAAPSI) yang terkait dengan pengelolaan pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
3. Program studi melakukan kajian kurikulum yang ada yaitu Kurikulum KKNI dan Profel lulusan serta rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada program studilain di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk memetakan mata kuliah yang dimungkinkan ada kesamaan atau kesesuaian dengan program studinya,pada prodi yang sama dan berbeda di luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
4. Program studi bersama Tim Pengembang memetakan paket-paket mata kuliah yang dapat dikonversi dan atau disetarakan dengan kegiatan:
 - a. Pertukaran pelajar
 - b. Magang/praktik industri
 - c. Asisten mengajar di Satuan Pendidikan
 - d. Penelitian/riset
 - e. Proyek kemanusiaan
 - f. Kegiatan wirausaha
 - g. Studi/proyek independent
 - h. Proyek di desa/ KKN Tematik
 - i. Bela Negara

Seluruh bentuk kegiatan ini ditetapkan sesuai dengan kebijakan yang telah diatur dalam Panduan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Prodi menetapkan mata kuliah yang akan ditawarkan kepada mahasiswa baik dari lingkungan UPMI maupun dari luar UPMI. Penetapan mata kuliah melalui proses rapat dosen di lingkungan program studi bersangkutan oleh Tim Penyusun Kurikulum di Program Studi.

5. Ketua Program Studi melakukan peninjauan terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan izin kerjasama dengan sekolah-sekolah tempat kegiatan magang bagi calon guru. Juga kepadalembaga/ instansi untuk lokasi kegiatan magang untuk menentukan kesesuaian kegiatannya dengan profil

lulusan dan atau CPL program studi.

6. Mengingat sistem pembiayaan seluruh kegiatan bersifat sentral di tingkat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, maka seluruh pembiayaan kegiatan pemetaan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diajukan oleh dekan kepada rektor. Selanjutnya setelah pemetaan mata kuliah yang ditawarkan dan sekolah/instansi sebagai tempat pelaksanaan magang dinyatakan final seijin dekan, selanjutnya disampaikan kepada Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran.
7. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran untuk dibahas di tingkat rektorat, selanjutnya mengunggah rancangan mata kuliah yang ditawarkan ke dalam portal akademik untuk dapat diakses oleh mahasiswa ataupun pihak-pihak berkepentingan.

2.2.2 Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama dilaksanakan sebelum semester baru berlangsung, sedangkan bagian kedua dilaksanakan sesuai jadwal semester ganjil dan genap setiap tahun.

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pelaksanaan yaitu:

1. Ketua Program Studi menyampaikan pengumuman tentang daftar prodi di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan di luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia beserta jenis mata kuliah yang ditawarkan.
2. Mahasiswa yang berencana untuk mengikuti pembelajaran pada program studi lain di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan di luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia melakukan pendaftaran melalui mengisi formulir yang telah disediakan secara *offline* dan *online*.
3. Mahasiswa dengan cara mengisi formulir baik secara *offline* dan *online* untuk menawarkan mata kuliah dan jenis program MBKM yang diinginkan.
4. Ketua Program Studi memberi waktu untuk mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk menelaah kesesuaian mata kuliah dan jenis program Merdeka belajar-Kampus Merdeka yang akan diambil oleh mahasiswa dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) prodi.
5. Mahasiswa melakukan kontrak kredit mata kuliah baik yang diikuti melalui proses pembelajaran maupun kegiatan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Mahasiswa

yang mengikuti kegiatan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mengambil matakuliah yang telah dipaketkan oleh prodi.

6. Ketua Program Studi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran di prodi lain di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan di luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia serta jenis program yang ditawarkan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik.
7. Serah terima mahasiswa yang memprogramkan kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka antar dekan dari pihak mahasiswa yang menawarkan program dengan dekan fakultas lain di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia atau kepada pihak perguruan tinggi lain di luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia atau pihak penerima kegiatan program MBKM.
8. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa gabungan dari mahasiswa prodi masing-masing dan mahasiswa dari prodi lain di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia secara luring dan daring dengan menggunakan berbagai aplikasi yang telah ditetapkan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
9. Dosen Pendamping dan dosen Pembimbing kegiatan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka mengantarkan mahasiswa ke lokasi kegiatan.
10. Dosen pengampu dan dosen pembimbing kegiatan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara mengunggah nilai ke *system edu-edu*.

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:



Gambar 2.3 Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Secara umum tahapan yang dilakukan oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam melaksanakan BKP MBKM mandiri, MBKM oleh Kemendikbudristek atau yang diselenggarakan oleh kementerian lain atau Lembaga yaitu :

A. Mekanisme Penyelenggaraan Mandiri.

1. Perguruan Tinggi

- Menyusun peraturan/kebijakan terkait implemetasi BKP MBKM mandiri yang antara lain memuat ruang lingkup dan persyaratan, program kredit pengakuan MBKM, tata cara kerjasama dengan mitra, pelaporan dan penilaian kegiatan, dan lain-lain.
- Menyusun dokumen operasional baku (BOP) beberapa alternative pengakuan kredit program MBKM.
- Melaksanakan kerjasama dengan mitra untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti MBKM.

2. Program Studi

- Mengembangkan kurikulum program studi yang mencakup perencanaan, proses

pembelajaran, penilaian dan evaluasi pembelajaran termasuk mekanisme dan prosedur konversi kegiatan belajar di luar prodi dalam program MBKM serta penjaminan mutu yang berbasis pada CPL prodi.

- b. Menyiapkan dosen pembimbing BKP MBKM.
- c. Mengadakan sosialisasi kegiatan BKP MBKM yang dilaksanakan oleh program studi.

3. Mitra

- a. Melakukan kerjasama penyelenggaraan kegiatan BKP MBKM.
- b. Menunjuk pembimbing lapangan.
- c. Memfasilitasi kegiatan BKP MBKM.
- d. Memberikan penilaian lapangan kegiatan BKP MBKM.

4. Dosen pembimbing

- a. Memantau perkembangan aktivitas MBKM.
- b. Melakukan validasi terhadap logbook dan pelaporan akhir aktivitas MBKM.
- c. Memberikan penilaian terhadap aktivitas MBKM.

5. Mahasiswa

- a. Mengikuti prosedur pendaftaran yang telah ditetapkan.
- b. Mengikuti aktifitas kegiatan BKP MBKM.
- c. Mengisi logbook.
- d. Melakukan pelaporan hasil aktivitas kegiatan BKP MBKM.

B. Mekanisme Penyelenggaraan oleh Kemendikbudristek atau sinergi Kemendikbudristek dengan Kementrian/Lembaga(K/L) Lain

C. Mekanisme penyelenggaraan MBKM oleh kemendikbudristek atau sinergi Kemendikbudristek dengan Kementrian/Lembaga lain mengikuti petunjuk teknis dan panduan masing-masing program antara lain : kampus mengajar, MSIB, IISMA, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Wirausaha Merdeka, Pejuang Muda, Gerilya, dan lain-lain. Perguruan tinggi dan prodi menyiapkan kebijakan/peraturan yang mendukung dan memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti BKP MBKM mulai dari pendaftaran hingga pengakuan kredit dapat diakses melalui laman <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>

Berikut penjelasan dan gambaran umum pelaksanaan masing-masing BKP MBKM, MBKM Kombinasi dan MBKM Mandiri.

A. Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran mahasiswa dilaksanakan untuk membentuk beberapa sikap :

1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain ; serta
2. Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedilian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan BKP MBKM pertukaran mahasiswa :

1. Memfasilitasi belajar lintas kampus, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang kebinekaan tunggal ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2. Memperoleh pengalaman natar budaya dan membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya dan agama sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Memperluas akses berbagai sumber pembelajaran untuk mengurangi disparitas pendidikan bai kantar perguruan tinggi dalam negeri maupun pendidikan tinggi di luar negeri.
4. Membangun jejaring yang luas di tingkat nasional dan internasional sehingga mampu memperluas kesempatan dalam pengembangan karir dan memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang tantangan nasional dan global kedepannya.

1. Pertukaran Mahasiswa Antar Program Studi yang ada di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI).

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum prodi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. Kegiatan pembelajaran dalam program studi lain di lingkungan UPMI dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan. Contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada UPMI :

Table 2.2. Contoh Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada PT yang sama

Prodi	CPL	Kompetensi tambahan	Prodi
Desain Produk	1. Mampu merancang produk	Mampu menyusun, menganalisis dan menginterpretasi rencana keuangan.	Akutansi
	2. Mampu mengevaluasi obyek desain	Mampu melaksanakan fungsi pemasaran.	Manajemen
	3. Mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain secara visual.	Mampu merancang program dalam bidang periklanan.	Komunikasi
		Mampu menerapkan teori linguistik arab termasuk struktur Bahasa, fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik	Sastra

2. Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama di Luar UPMI

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan capaian CPL. Kegiatan pembelajaran dalam prodi yang sama di luar UPMI dapat dilakukan secara tatap muka maupun daring.

Table 2.3 Contoh kegiatan pembelajaran dalam prodi yang sama di luar UPMI.

Prodi	CPL Prodi	MK Prodi PT A	MK prodi PT B
Kehutanan	➤ mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan	➤ pengelolaan ekosistem hutan mangrove ➤ pengelolaan ekosistem hutan pegunungan	➤ pengelolaan ekosistem hutan dataran rendah ➤ pengelolaan ekosistem hutan pantai

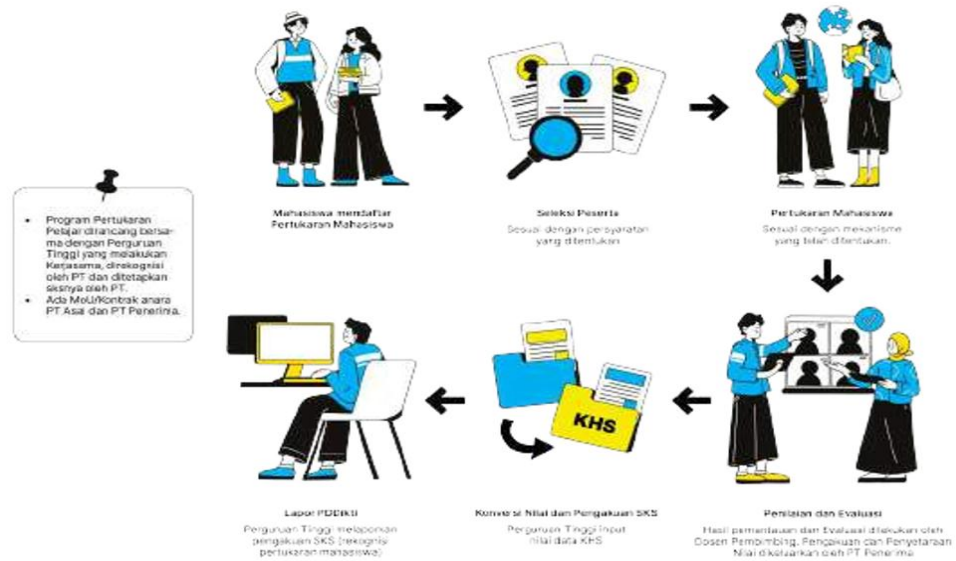
3. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi lain di luar UPMI

Bentuk pembelajatan yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi di luar UPMI untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya CPL. Kegiatan pembelajaran pada program studi lain di luar UPMI dapat dilakukan secara luring maupun daring.

Table 2.4 Contoh Kegiatan Pembelajaran dalam Prodi Lain pada PT yang berbeda.

Prodi PT A	CPL Prodi	Kompetensi Tambahan	MK prodi lain-PT lain
Teknik Industri	Mampu merancang system/komponen, proses produk industry untuk memenuhi kebutuhan dalam Batasan-batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan).	Mampu merancang produk untuk kebutuhan pertanian.	Energi dan mesin pertanian-PT B
		Mampu membangun model untuk menganalisis sumber daya lingkungan.	Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan -PT-C

Proses Program Pertukaran Mahasiswa



Gambar 2.4 Proses Program Pertukaran Mahasiswa

Tugas Perguruan Tinggi Pengirim

1. Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
2. PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang balik/resiprokal).
3. Bila diperlukan penyelenggaraan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
4. Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
5. Melakukan konversi nilai dan atau pengakuan sks mahasiswa.
6. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Dirjendikti melalui PDPT.
7. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.

Tugas perguruan Tinggi Penerima

1. Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.

2. Menjamin terselenggaranya pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
3. PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang balik/resiprokal).
4. Bila diperlukan penyelenggaraan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
5. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
6. Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
7. Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk dikonversi dan/atau diakui di perguruan tinggi asalnya.

B. Magang /Praktek Kerja

Magang/Praktik Kerja bertujuan untuk memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Merupakan kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). Kegiatan ini wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, serta industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya *recruitment dan training* awal. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerjadan karirnya.

Tanggung jawab perguruan tinggi Asal adalah

- 1) Menyiapkan keberangkatan mahasiswa
- 2) Menungaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
- 3) Bisa dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi
- 4) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang

- 5) Perguruan tinggi akan memberikan pembekalan dan arahan terkait dengan tugas- tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa selama proses magang/praktik kerja.
- 6) Perguruan tinggi akan memberikan program yang telah disusun bersama mitra/tempat mahasiswa magang yang berkaitan dengan kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa maupun hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang/praktik kerja.
- 7) Memberikan pendamping/ dosen pembimbing kepada mahasiswa selama proses magang/praktik kerja.

Tanggung jawab perusahaan tempat magang (Tempat kegiatan pembelajaran)

- 1) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai kesepakatan
- 2) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang/praktek kerja
- 3) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang)
- 4) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian
- 5) Memberikan program yang telah disusun dan disepakati bersama perguruan tinggi kepada mahasiswa.
- 6) Memberikan nilai dan sertifikat kepada mahasiswa berdasarkan kinerja selamaproses magang/praktik kerja yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam pengakuan sks yang telah diprogram oleh mahasiswa.

Rekognisi Satuan Kredit Semester (sks)

- 1) Untuk 1(satu satuan kredit semester (sks) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus duapuluh) menit magang di dunia kerja/industri
- 2) Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi sertapenilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti magang/praktek kerja.

Sebagai contoh: Mahasiswa Magang di Industri selama 6 bulan

Hard skills:

- Merumuskan permasalahan keteknikan : 3 SKS A
- Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan : 3 SKS B

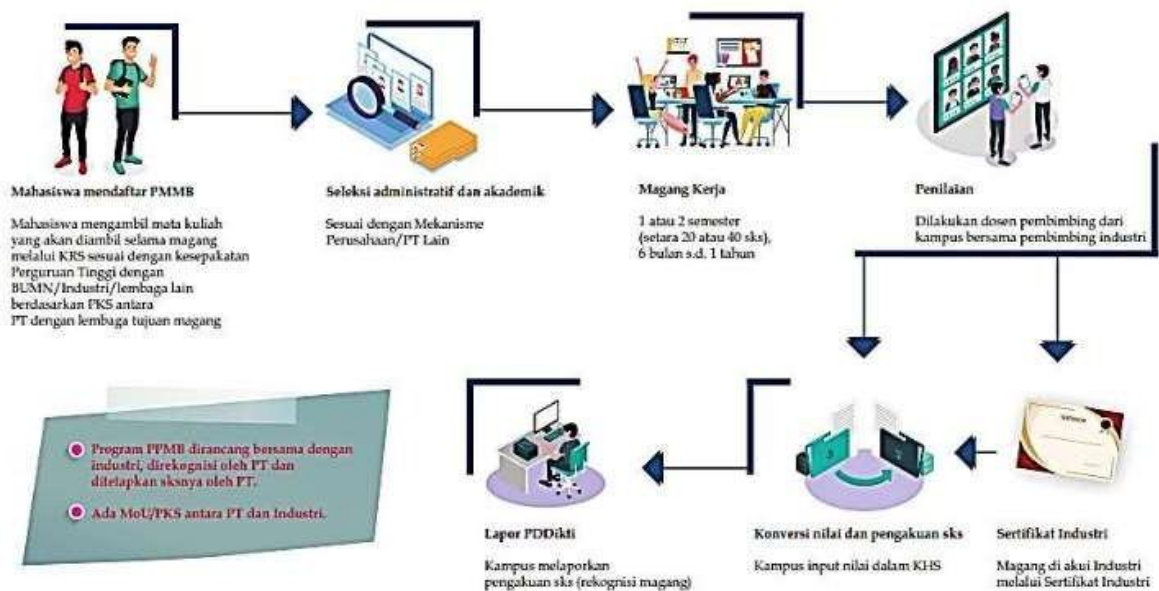
- Kemampuan sintesa dalam bentuk design : 4 SKS A

Soft skills:

- Kemampuan berkomunikasi : 2 SKS A
- Kemampuan bekerjasama : 2 SKS A
- Kerja keras : 2 SKS A
- Kepemimpinan : 2 SKS A
- Kreativitas : 2 SKS B

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

Program Mahasiswa Magang Bersertifikat



Gambar 2.5. Alur Mahasiswa Melakukan Program Magang/Praktek Kerja

Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring Kegiatan Pembelajaran

Monitoring dilakukan secara kontinyu oleh pembimbing lapangan dan pembimbing akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pembimbing lapangan melakukan monitoring setidaknya 24 kali selama mahasiswa magang, serta mengisi form monitoring.

- b) Pembimbing akademik melakukan monitoring setidaknya 12 kali selama mahasiswa magang, serta mengisi form monitoring

2. Evaluasi

Evaluasi magang dilaksanakan secara periodik oleh pembimbing lapangan di tempat magang dan pembimbing akademis magang. Nilai yang diperoleh digabung secara proporsional seperti dalam uraian berikut:

- 1) Kompetensi dan Indikator yang dinilai

Adapun kompetensi pada program magang ini yaitu:

a. Hard skills

- (1) Kemampuan penerapan management
- (2) Kemampuan penyusunan program
- (3) Penguasaan Substansi keilmuan
- (4) Kemampuan melakukan evaluasi

b. Soft skills

- (1) Etika (kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab)
- (2) Kemampuan kerjasama (komunikasi, adaptasi)
- (3) Kecakapan bekerja (inisiatif, cekatan, responsif, penguasaan alat, kemampuan memecahkan masalah)
- (4) Inisiatif dan inovatif

Adapun indikator yang menjadi penilaian yaitu:

- (1) Perilaku professional
- (2) Laporan magang
- (3) Penyajian laporan

- 2) Format Penilaian

Komponen penilaian terdiri dari :

- a) Penilaian dari pembimbing lapangan pada unit kerja Bobot 40 %

- (1) Etika (kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab)
- (2) Kemampuan kerjasama (komunikasi, adaptasi)
- (3) Kecakapan bekerja (inisiatif, cekatan, responsif, penguasaan alat, kemampuan memecahkan masalah)

- (4) Inisiatif dan inovatif
 - (5) Kemampuan penerapan hard skill
- b) Pembimbing Akademik Bobot 40 %
- (1) Kelengkapan administrasi (cap instansi magang, tanda tangan pembimbing lapangan, ketepatan waktu)
 - (2) Pemahaman terhadap gambaran instansi tempat magang
 - (3) Kedalaman pembahasan dan rincian kegiatan magang
 - (4) Pemahaman terhadap bidang / fokus magang yang dipelajari
 - (5) Kesesuaian penulisan dengan format laporan magang
- 3) Seminar Laporan Magang Bobot 20%
- a) Kemampuan presentasi/penyajian laporan
 - b) Kesesuaian penulisan dengan format laporan magang
 - c) Kedalaman pembahasan dan rincian kegiatan magang
 - d) Pemahaman terhadap bidang / fokus magang yang dipelajari
 - e) Sikap dan Perilaku mahasiswa selama ujian seminar magang

Tabel 2.5. Kriteria Penilaian Magang

No.	Nilai Prestasi	Bobot Prestasi	Rentang Angka
1	A	4.00	85 - 100
2	A-	3.75	80.00 - 84.99
3	B+	3.50	75.00 – 79.99
4	B	3.00	70.00 – 74.99
5	B-	2.75	65.00 – 69.99
6	C+	2.50	60.00 – 64.99
7	C	2.00	55.00 – 59.99
8	D	1.00	45.00 – 49.99
9	E	0.00	0.00 – 44.99

Pembiayaan program meliputi:

- a) Hak dan Kewajiban para pihak/Perguruan Tinggi yang bekerjasama.
- b) Hak dan Kewajiban mahasiswa peserta Program.
- c) Hak dan Kewajiban dosen pengampuh mata kuliah.
- d) Penyelesaian perselisihan.
- e) Memberikan layanan pembiayaan kegiatan bagi mahasiswa dan dosen pembimbing penelitian

C. Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah (PISA 2018 peringkat Indonesia no 7 dari bawah). Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, non-formal maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- 2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil. Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud. Tujuan program ini untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang Pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah. Program ini membantu pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan Perkembangan zaman

Tanggung Jawab Para Pihak Terkait

a. Peran Perguruan Tinggi Pengirim (UPMI):

- 1) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan
- 2) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan pendidikan di mana mahasiswa mengambil kegiatan pembelajaran.
- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 4) Data sekolah ditetapkan oleh Kemendikbud serta jumlah pengajar yang dibutuhkan diajukan oleh masing-masing pemerintah daerah.
- 5) Menyelenggarakan seleksi terhadap mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan berdasarkan persyaratan yang ada dalam kebijakan atau pedoman akademik.
- 6) Menugaskan Dosen Pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 7) Melakukan penyetaraan / rekognisi jam kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan untuk diakui sebagai sks.
- 8) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Peran Pusat Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)

Lembaga Pengembangan Pembelajaran Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPPM) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

- 1) Koordinasi dengan pihak eksternal yaitu Dinas Pendidikan
- 2) Koordinasi dengan pihak fakultas dan Jurusan/Program Studi
- 3) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Pembekalan Program Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan

c. Peran Fakultas

- 1) Mensosialisasikan program Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan kepadamahasiswa di tingkat fakultas
- 2) Berkoordinasi dengan pihak universitas dan jurusan/prodi dalam penentuandosen pembimbing pada program Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan

d. Peran Jurusan/Prodi

- 1) Mensosialisasikan program Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan kepada mahasiswa di tingkat jurusan/prodi
- 2) Berkoordinasi dengan pihak universitas, Lembaga Pengembangan Pembelajaran Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPPM), dan Fakultas dalam penentuan dosen pembimbing pada program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.
- 3) Menyiapkan alternatif perkuliahan daring apabila jumlah sks yang diharapkan belumterpenuhi dari program Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan yang diambil mahasiswa.

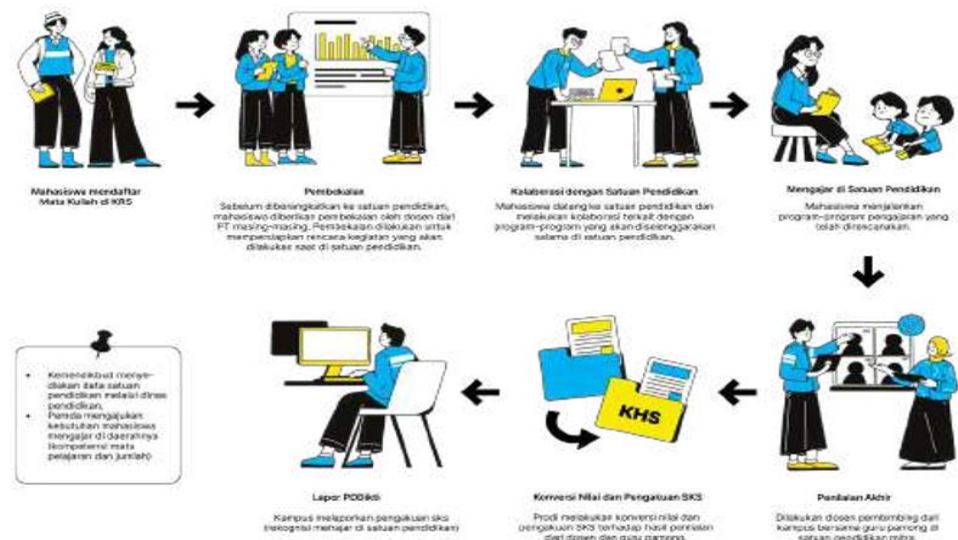
e. Peran Sekolah/Satuan Pendidikan

- 1) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuaidengan kesepakatan di kontrak kerja sama
- 2) Menunjuk guru pamong atau guru pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatanmengajar di satuan Pendidikan

Rekognisi satuan kredit semester

- 1) 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatannya mengajar di sekolah.
- 2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa.

Proses Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan



Gambar 2.6. Proses Program Asistensi Mengajar di Satuan pendidikan

Penilaian Hasil Belajar

a. Prinsip Penilaian.

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM program Asistensi Mengajar mengacu pada 5 prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

b. Aspek-aspek Penilaian

c. Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM program Asistensi Mengajar, setidaknya sebagaiberikut:

- 1) Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan program KKNT
- 2) Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas.
- 3) Sikap.
- 4) Kemampuan melaksanakan tugas-tugas.
- 5) kemampuan membuat laporan.

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan program Asistensi Mengajar dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan pada akhir kegiatan berupa ujian dan laporan kegiatan (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan oleh Guru Pamong dan Dosen Pembimbing. Penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong.

d. Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaian

Kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks termasuk penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi hard skills, maupun kompetensi soft skills sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi berikut:

Hard skills:

- PLP 2 : 4 sks
- KKN : 4 sks
- Mata Kuliah Pendukung : 4 sks

Soft skills:

- Kemampuan berkomunikasi : 2 sks
- Kemampuan bekerjasama : 2 sks
- Kreativitas dan Inovasi : 2 sks

Biaya yang ditimbulkan dari program kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan inidibebankan pada Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa yang telah dibayarkan.

D. Penelitian / Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu

melakukan metodiseriset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalambidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester sampai 1 tahun).

Tujuan program penelitian/riset antara lain:

- 1) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent*peneliti secara topikal.
- 2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- 3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawahpengawasan dosen atau peneliti. Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, Perguruan Tinggi, dan seterusnya. Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Penelitian mahasiswa diharapkan mampu ditingkatkan secara kualitas maupun kuantitas masa riset yang dapat diambil oleh mahasiswa. Sehingga, mahasiswa dapat mendapatkan hasil penelitian dengan luaran yang lebih optimal. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dengan regenerasi peneliti sejak dini.

Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut.

a. Peran Perguruan Tinggi Pengirim (UPMI):

- 1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan laboratorium dan atau lembagariset mitra kegiatan penelitian
- 2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di Lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- 3) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan serta bersama sama dengan peneliti di Lembaga/laboratorium riset untuk

memberikan nilai.

- 4) Dosen bersama peneliti menyusun form logbook.
- 5) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di Lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- 6) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Lembaga Riset/ Mitra

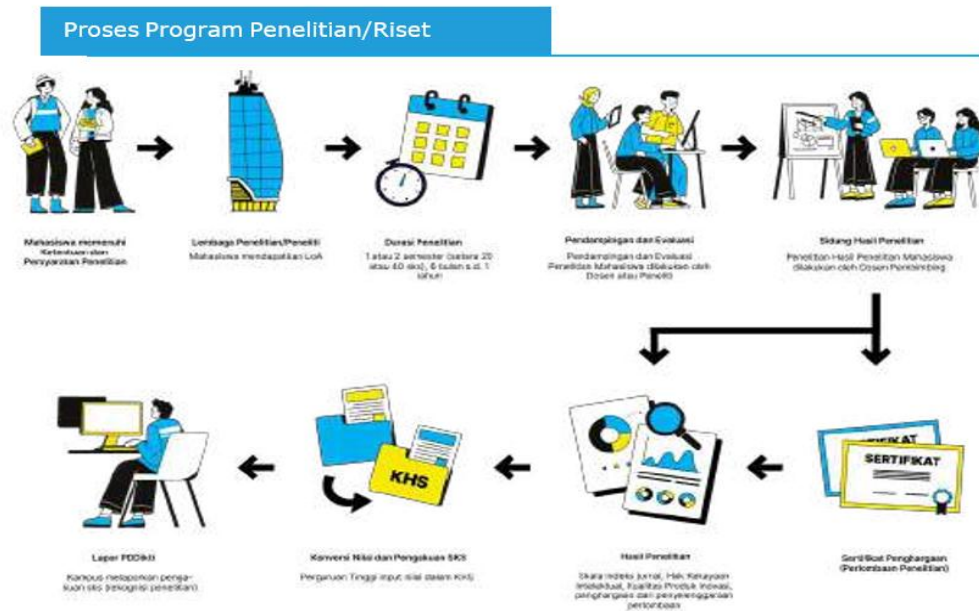
- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di Lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Menunjuk pendamping (pembimbing lapangan) untuk mahasiswa dalam menjalankan penelitian/riset
- 3) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa

c. Mahasiswa

- 1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
- 2) Melakukan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset /pusat studi tempat melakukan riset.
- 3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

Rekognisi satuan kredit semester

- 1) 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 45 jam persemester
- 2) Penilaian dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan oleh lembaga/laboratorium tempat mahasiswa mengikuti kegiatan risetnya
- 3) Luaran akhir riset mahasiswa dapat menjadi pertimbangan penilaian proyek riset mahasiswa.



Gambar 2.7. Proses program Penelitian/Riset

E. Proyek Kemanusiaan

Menjadikan mahasiswa paripurna yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada agar dapat diselesaikan sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut :

a. Perguruan Tinggi

1. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB,dll) maupun dari Lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
2. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh

mahasiswa.

3. Dosen bersama Lembaga mitra menyusun form logbook.
4. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
5. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
6. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Dirjen Dikti melalui PDDIKTI.

b. Lembaga Mitra

1. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
2. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
3. Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa.
5. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

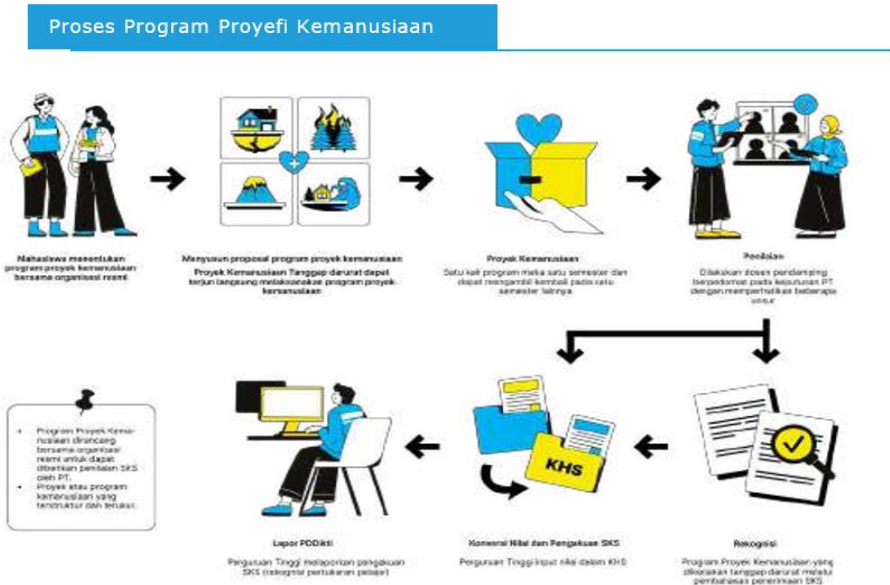
c. Mahasiswa

1. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
2. Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan dibawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
3. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

Rekognisi satuan kredit semester

- 1) 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 45 jam persemester dimana mahasiswa melakukan kegiatan proyek kemanusiaannya.
- 2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dan penilaian dari

mentor dari organisasi kemahasiswaan atau Lembaga penyelenggaran kegiatan kemanusiaan berdasarkan peran mahasiswa dalam proyek kemanusiaan, hasil yang didapatkan, serta tingkat kesulitan dan kompleksitas isu kemanusiaan yang dikerjakan.



Gambar 2.8. Proses Program Proyek Kemanusiaan

F. Kegiatan Wira Usaha

Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat wirausaha untuk mengembangkan usahanya secara lebih leluasa. Untuk menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- 1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- 2) Menangan permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun yang sudah

ditetapkan dalam kurikulum program studi, persyaratannya diatur dalam pedoman akademik UPMI. Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut :

a. Perguruan Tinggi

1. Program kewirausahaan mahasiswa disusun pada tingkat perguruan tinggi dengan menyusun silabus yang dapat memenuhi 20 sks/semester atau 40 sks/tahun.
2. Program tersebut dapat merupakan kombinasi beberapa mata kuliah teori dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi termasuk kursus/micro credentials yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
3. Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik assesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 sks/40 sks.
4. Selama mengikuti program wirausaha mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang sudah berhasil
5. Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum, dapat bekerjasama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
6. Perguruan tinggi bekerjasama dengan institusi mitra dalam menyediakan system pembelajaran kewirausahaan terpadu dengan praktik langsung. System pembelajaran ini dapat berupa fasilitas penelitian, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
7. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

b. Mahasiswa

1. Dengan persetujuan DPA mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
2. Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
3. Melaksanakan kegiatan wirausaha dibawah bimbingan dosen pembimbing atau

mentor kewirausahaan.

4. Menyampaikn hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Rekognisi satuan kredit semester

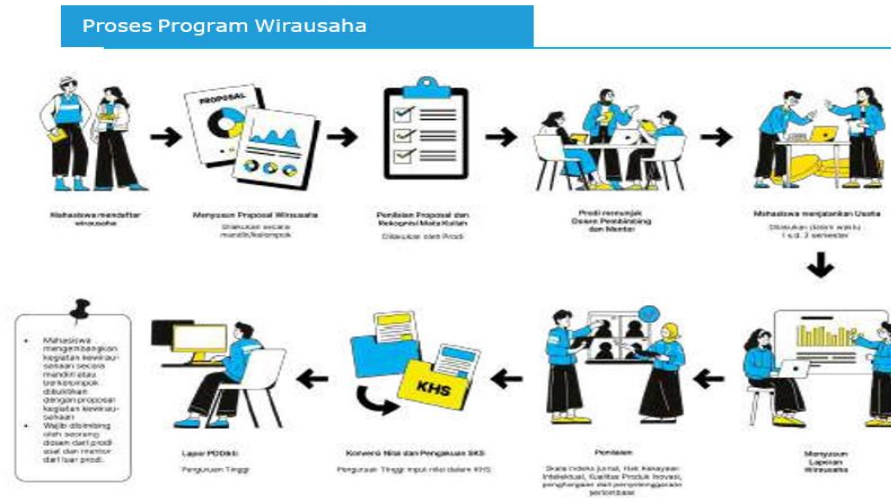
- 1) 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara 45 jam persemester untuk mahasiswa melakukan kegiatan mahasiswa dalam menjalankan proyek wirausahanya.
- 2) Penilaian dilakukan oleh dosen pendamping dengan memerhatikan capaian dari proyek kewirausahaan yang dijalankan mahasiswa (besarnya keuntungan, manfaat sosial, besar karyawan, besaran modal, jangkauan pasar, dan lainnya)

Tabel 2.6. Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (Bentuk Blended)

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jml.SKS
Ilmu Komunikasi	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Kewirausahaan Sosial	3
		Etika Bisnis	2
		Pengantar Manajemen dan Bisnis	2
		Pemasaran Digital	3
		Wirausaha	
		1. Desain Wirausaha dan Presentasi	3
		2. Praktik Wirausaha	4
		3. Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi	3
	Jumlah	6 MK	20 SKS

Penjelasan Tabel 6. Mahasiswa Ilmu Komunikasi mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa Kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL), proses pencapaian CPL tersebut dapat diekuivalensikan ke dalam mata kuliah

Kewirausahaan Sosial, Etika Bisnis, Pengantar Manajemen dan Bisnis, Pemasaran Digital, Desain Wirausaha dan Presentasi, Praktik Wirausaha, serta Laporan Wirausaha dan Presentasi yang setara dengan 20 sks.



Gambar2.9. Proses Program Wirausaha

Biaya yang ditimbulkan oleh pengambilan Mata Kuliah pada Program Kegiatan Wirausaha di UPMI dibebankan pada uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa yang telah dibayarkan. Jika biaya yang ditimbulkan melebihi UKT yang telah dibayarkan maka biaya tersebut menjadi tanggungan mahasiswa sendiri.

G. Studi/ Proyek Independen

Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain. Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. Dalam upaya untuk menjawab tantangan bagi perguruan tinggi, dibutuhkan proses pembelajaran yang menjamin otonomi dan fleksibilitas di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Melalui proses yang otonom dan fleksibel diharapkan tercipta kultur belajar yang sifatnya inovatif, meniadakan pengekanan serta sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selain itu perlu adanya prakondisi bagi terciptanya *link and match* antara penyelenggaraan pendidikan di kampus dengan dunia usaha dan dunia industri. Mahasiswa perlu dipersiapkan sedari

awal dalam menghadapi kompetisi dan daya saing pada dunia kerja.

Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

- 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Studi/proyek independent dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independent kedalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas dibawah koordinasi dosen pembimbing. Mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independent adalah sebagai berikut.

a. Peran Perguruan Tinggi

1. Menyediakan dosen pendamping untuk proyek independent yang diajukan oleh mahasiswa
2. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas program studi dan lintas fakultas.
3. Menilai kelayakan proyek independent yang diajukan.
4. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh mahasiswa
5. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independent mahasiswa untuk disetarakan menjadi sks.

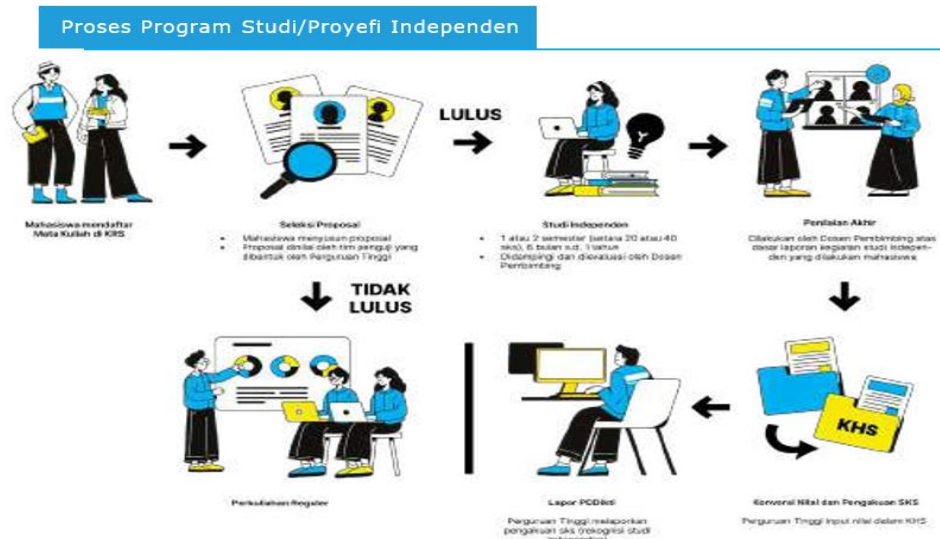
b. Mahasiswa

1. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
2. Membuat proposal kegiatan studi independent lintas disiplin.
3. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional
4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Rekognisi satuan kredit semester

- 1) 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 45 jam persemester dimana mahasiswa melakukan kegiatan proyek independennya

- 2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping/pembimbing dengan mengutamakan kepada luaran yang dihasilkan dari kegiatan proyek independent mahasiswa.



Gambar 2.10. Proses Program Studi/Proyek Independen

Kegiatan studi atau proyek independen selama 1 semester atau 6 bulan disetarakan dengan 20 sks. Total 20 sks tersebut diperhitungkan melalui kompetensi yang diperoleh mahasiswa selama berkegiatan. Kompetensi mahasiswa yang dihitung terbagi ke dalam hardskills dan soft skills terdiri dari:

1) *hard skills*

- a) Produk Tepat Guna = 4 sks
- b) Produk Daya Guna = 4 sks
- c) Produk Berhasil Guna = 4 sks

2) *soft skills*

- a) Komunikasi = 2 sks
- b) Kolaborasi = 2 sks
- c) Kreativitas = 2 sks
- d) Inovasi = 2 sks
- e) Prinsip Penilaian

Penilaian dalam kegiatan studi atau proyek independen dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.

Mengacu pada prinsip penilaian tersebut di atas aspek-aspek penilaian dalam pelaksanaan kegiatan studi atau proyek independen mencakup:

1. prosentase kehadiran baik selama pembekalan maupun pelaksanaan kegiatan;
2. tingkat kedisiplinan serta tanggungjawab dalam melaksanakan berbagai macam tugas;
3. Sikap dan etika baik sosial maupun akademis;
4. kemampuan menyelesaikan tugas-tugas; dan
5. kemampuan menyusun laporan-laporan kegiatan.

Berpijak pada prinsip kesinambungan, pelaksanaan penilaian kegiatan studi atau proyek independen dilakukan selama jalannya kegiatan (penilaian proses) serta akhir kegiatan yang berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Pada penilaian proses, dilaksanakan dengan teknik, Tanya jawab, observasi baik secara kepribadian maupun interaksi sosial, serta review logbook. Sementara penilaian hasil dilaksanakan ketika pelaksanaan studi atau proyek telah berakhir berdasarkan laporan yang telah disusun oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari UPMI secara mandiri atau bersama-sama jika kegiatan melibatkan pihak ketiga.

Pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan program didasarkan pada prinsip mandiri dan kolaboratif terwujud ke dalam:

- a) Hak dan kewajiban mahasiswa peserta program;
- b) Hak dan kewajiban dosen pengampu mata kuliah;
- c) Dimungkinkan untuk mengajukan sponsorsip
- d) Sumber pembiayaan lain yang dapat diadakan dengan prinsip kesepakatan.

H. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Dapat dilakukan bersama aparat desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi atau organisasi lainnya, wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Dalam hal ini, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia telah melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia diterjunkan ke desa-desa dalam bentuk kelompok, untuk turut serta membantu menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang ada di desa, seperti: masalah sampah, masalah manajemen dan administrasi desa, peningkatan inovasi dan kreativitas UMKM/wirusaha yang ada di desa, dan banyak lagi yang lainnya. Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat mendampingi Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat mendampingi perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, Menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendisain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, mensupervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan bidang ilmu dan minat mahasiswa dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

1. Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan yang dimiliki bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
2. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan kementrian Desa PDTT.

Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain :

1. Bagi mahasiswa
 - a. Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
 - b. membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rencana kegiatan pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama dosen pendamping, pemerintah desa, penggerak swadaya masyarakat (PSM), kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), pendamping local desa dan unsur masyarakat.
 - c. Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan pemerintah desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.

- d. mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

2. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Memberikan umpan balik tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
- b. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
- c. Menjadi sarana pengembangan tri darma perguruan tinggi.
- d. Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Bagi Desa

- a. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga pendidik untuk menyusun RPJMDes dan rencana kegiatan pembangunan desa.
- b. Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
- c. Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- e. Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Selain persyaratan umum, dalam kegiatan KKNT dalam MBKM juga terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa :

1. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6
2. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa dan bersifat multi disiplin.
3. Peserta wajib tinggal di desa di lokasi yang telah ditentukan.
4. Sehat jasmani, rohani dan tidak sedang hamil bagi wanita.
5. IPK minimal 2,0 sampai dengan semester 5
6. Ketentuan lain diatur oleh UPMI.

Untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut :

a. Peran Perguruan Tinggi

1. Menjalani kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta

Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.

2. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
3. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
4. Menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
5. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
6. Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan keamanan dan keselamatan mahasiswa selama berada di lapangan.
7. Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKN Tematik.
8. Melaporkan hasil kegiatan KKN Tematik ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

b. Mahasiswa

1. Wajib tinggal (live in) di lokasi yang telah ditentukan.
2. Jika dalam pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 sks maka mahasiswa dapat mengambil mata kuliah daring atau lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh UPMI.
3. Proses dan hasil kegiatan di tulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi UPMI.
4. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan.

c. Pembimbing

1. DPA bertanggungjawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai akhir.
2. Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
3. Melibatkan unsur-unsur mitra misalnya PSM maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.

4. Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan bimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.

d. Lokasi Pelaksanaan

1. Lokasi berdasarkan rekomendasi Dirjen Dikti.
2. Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
3. Desa-desanya binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
4. Radius desa lokasi KKNT dengan perguruan tinggi dirancang 200 km.
5. Desa lainnya yang diusulkan oleh mitra (pemda, industry dan lainnya).

e. Mitra

1. Pemerintah (Kemdes, desa binaan PT, kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri dan Lembaga lainnya).
2. Pemerintah Daerah.
3. BUMN dan industry.
4. Social investment
5. Kelompok masyarakat (perantau dan diaspora).

f. Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi khusus)

1. Berkait dengan mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini kepada pengelola KKNT UPMi yang disertai dengan surat keterangan dari pihak berwenang.
2. UPMi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan keamanan dan keselamatan mahasiswa.
3. UPMi memberikan pembekalan tentang kearifan local masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

g. Pendanaan

a. Sumber pendanaan

1. Perguruan Tinggi
2. Mitra
3. Sumber lain yang tidak mengikat
4. Mahasiswa

b. Komponen Penggunaan dana

1. Transportasi
2. Biaya hidup
3. Asuransi kecelakaan dan kesehatan
4. Biaya program
5. Pembiayaan lain “incidental” yang timbulberkait pelaksanaan program

Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)

- 1) 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 45 jam per semester dimana mahasiswa melakukan kegiatan proyek desa
- 2) Penilaian dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan oleh supervisor desa tempat mahasiswa melakukan kegiatanproyeknya.

Proses monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari pelaksanaan program KKN Tematik dalam upaya menjaga kualitas program yang dilaksanakan. Untuk menjamin mutu program KKN Tematik maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Proses monitoring dan evaluasi program KKNT dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh universitas. Monitoring bertujuan untuk memastikan jalannya program sesuai dengan rancangan programdari universitas. Evaluasi program dilakukan sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas program. Hasil monitoring dan evaluasi program dilaporkan oleh timkepada penanggung jawab kegiatan KKN Tematik.

Jaminan Mutu

- 1) Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu
 - a) Menyusun kebijakan dan manual mutu untuk program KKN Tematik yang terintegrasi dengan penjaminan mutu UPMI.
 - b) Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu program KKN Tematik mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlakudi UPMI.
 - c) Kebijakan dan manual mutu Program KKN Tematik yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, mitrapelaksana program dan peserta program.
- 2) Menetapkan Mutu Agar pelaksanaan kebijakan MBKM, program KKN Tematik

dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain:

- a) Mutu kompetensi peserta.
- b) Mutu pelaksanaan program.
- c) Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
- d) Mutu sarana dan pasarana penunjang program.
- e) Mutu pelaporan.
- f) Mutu penilaian.

Penilaian Hasil Belajar

a. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM program KKN Tematik mengacu pada 5 prinsip sesuai SN Dikti yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

b. Aspek-aspek Penilaian

Sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM program KKN Tematik, setidaknya sebagai berikut:

- 1) Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan program KKN Tematik.
- 2) Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas.
- 3) Sikap.
- 4) Kemampuan melaksanakan tugas-tugas.
- 5) Kemampuan membuat laporan.

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan program KKN Tematik dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan pada akhir kegiatan berupa laporan kegiatan (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan oleh kepala desa/pembimbing lapangan. Penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan. Kegiatan KKN Tematik selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai

dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi- kompetensi berikut:

Hard skills:

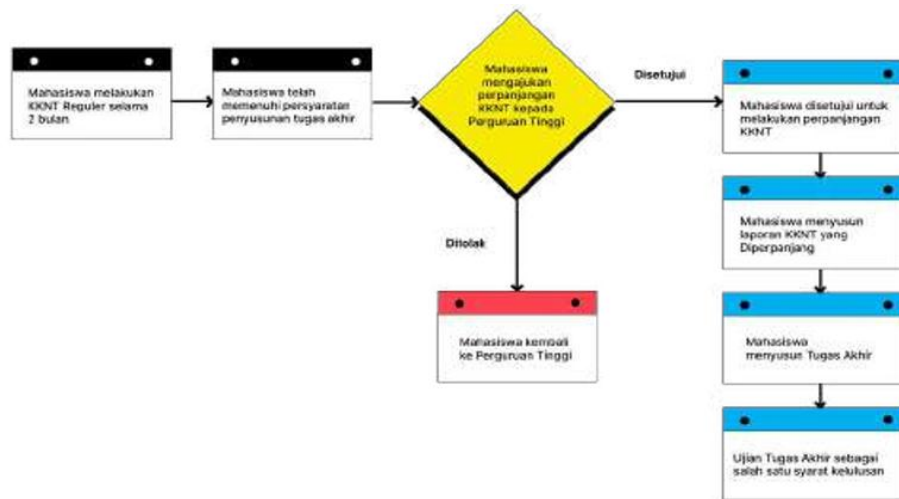
- Merumuskan permasalahan yang ada di desa : 3 sks
- Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan: 3 sks
- Kemampuan sintesa dalam bentuk design : 4 sks

Soft skills:

- Kemampuan berkomunikasi : 2 sks
- Kemampuan bekerjasama : 2 sks
- Kerja keras : 2 sks
- Kepemimpinan : 2 sks
- Kreativitas : 2 sks

1. Model KKNT yang Diperpanjang

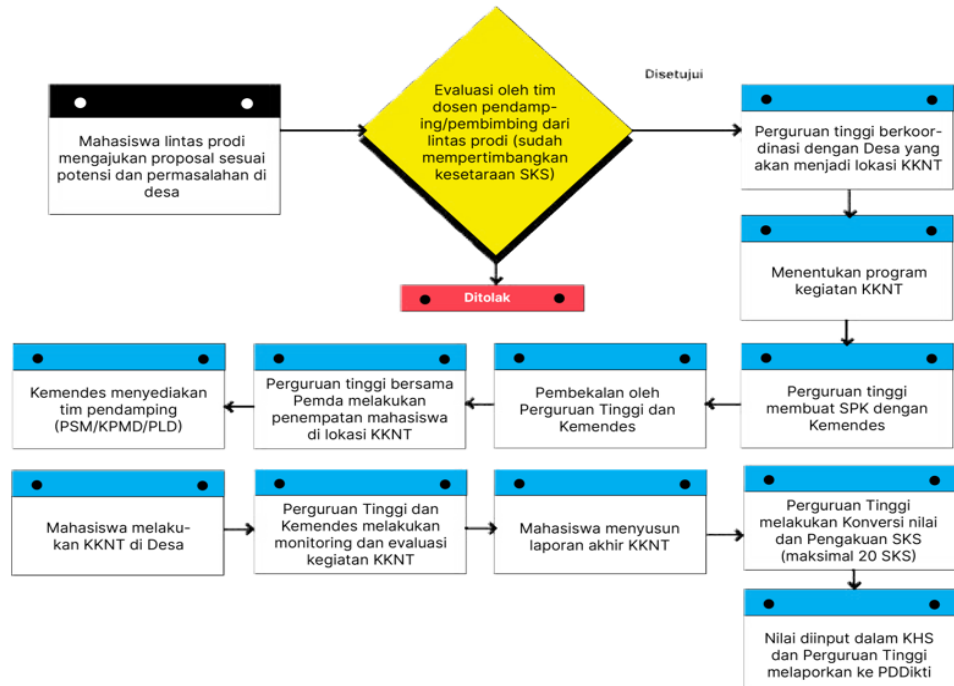
Dalam model ini UPMi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh oleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 sks. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang mahasiswa dapat memanfaatkan program Program Holistik pembinaan dan Pemberdayaan desa (PHP2D) mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.



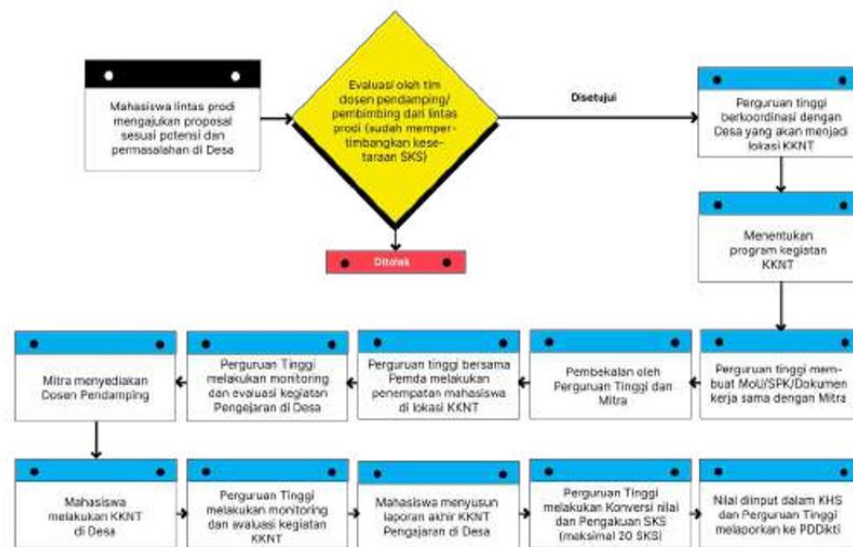
Gambar 2.11. Contoh Model KKNT yang Diperpanjang

2. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini, UPMi bekerjasama dengan mitra dalam melakukan KKNT pembangunan dan pemberdayaan desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah mahasiswa dan bidang yang digarap yang mengikuti disesuaikan dengan kebutuhan desa. Pelaksanaan KKNT pembangunan dan pemberdayaan desa dilakukan selama 6-12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 sks. Perhitungan terhadap capaian pembelajarab setara 20 sks dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan program holistic pembinaan dan pemberdayaan desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur Direktorat Belmawa.



Gambar 2.12 Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Kemendes

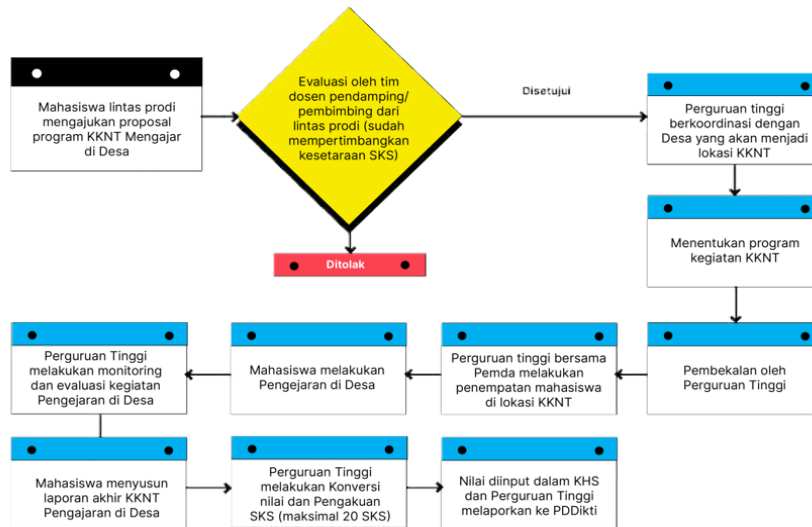


Gambar 2.13. Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa bersama Mitra

3. Model KKNT Mengajar di Desa

Kegiatan ini diutamakan bagi mahasiswa program studi pendidikan. Bagi mahasiswa

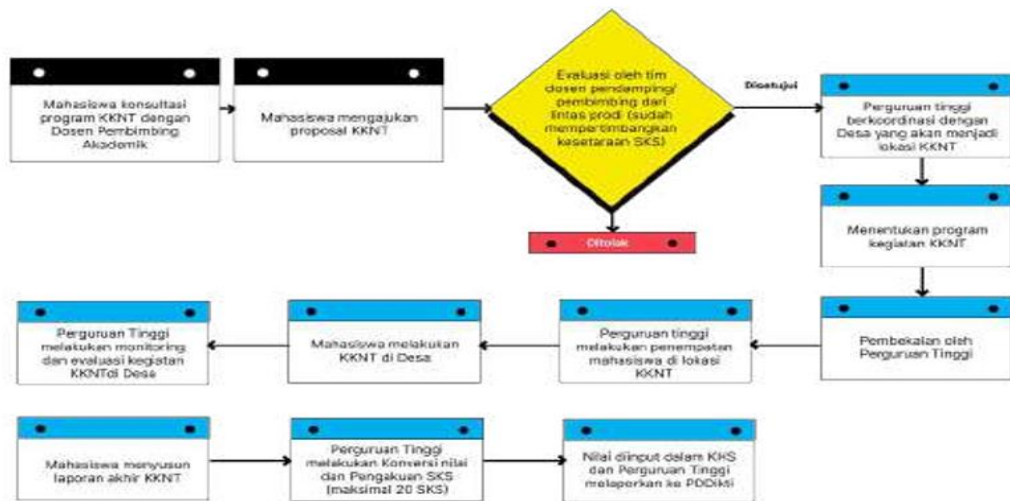
di luar kependidikan dapat melakukan kegiatan ini sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan ini berisi membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila diakhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada program studi.



Gambar 2.14. Contoh Model KKNT Mengajar di Desa

4. Model KKNT Free Form

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing akademik.



Gambar 2.15. Contoh Model KKNT Free Form



Gambar 2.16. Proses Program membangun Desa/KKNT

I. Bela Negara

Bela negara dalam MBKM ditujukan untuk mendorong mahasiswa berperan aktif dalam membangun kecintaan dan kepedulian terhadap bangsa dan negara. Program ini mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan nasional, memperkuat semangat bela negara, mengembangkan karakter dan ketrampilan yang diperlukan sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Bela

negara dapat berupa aktivitas terstruktur yang dipersiapkan oleh UPMI dengan bekerja sama dengan mitra seperti kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Lembaga terkait lainnya. Bela negara diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri dan berkontribusi dalam berbagai bidang seperti kemanusiaan, lingkungan, budaya, olah raga, pemberdayaan masyarakat maupun yang lainnya yang bermuara bagi mahasiswa. Tujuan program Bela Negara antara lain :

1. Menjadikan mahasiswa sebagai sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kesadaran dan kemampuan bela negara yang Tangguh dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mendukung Indonesia maju, Bersatu, berdaulat, mandiri dan sejahtera.
2. Meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam hal pengembangan diri dan berkontribusi dalam berbagai bidang seperti kemanusiaan, lingkungan, budaya, olah raga, pemberdayaan masyarakat dan lain-lain yang bermanfaat bagi mahasiswa, lingkungan sekitar dan negara.
3. Membantu penyelesaian masalah atau mendukung upaya percepatan pembangunan dan pencapaian tujuan bersama sehingga berdampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar (secara sempit) dan berdampak bagi negara (secara luas).

Manfaat program Bela Negara antara lain :

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Membuat mahasiswa mampu membangun kapasitas sebagai individu.
 - b. Memupuk kecintaan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk membangun kecintaan dan kepedulian terhadap negara.
 - c. Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan masyarakat atau Lembaga pemerintah.
 - d. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan yang dimiliki untuk membantu upaya percepatan pembangunan negara.
2. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Memberikan umpan balik bagi UPMI khususnya dalam mengembangkan

kurikulum relevan yaitu kebutuhan yang diperlukan secara nyata oleh masyarakat dan negara.

- b. Menjadi sarana bagi UPMI dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dengan masyarakat maupun pemerintah, dalam upaya membantu pencapaian visi, misi UPMI, tujuan negara dan meningkatkan kesejahteraan nasional.
- c. Menjadi sarana pengembangan tri darma perguruan tinggi.

3. Bagi Mitra

- a. Mampu melakukan sinergi dan akselerasi pencapaian visi, misi dan program Lembaga khususnya dalam kaitan dengan penciptaan kesejahteraan social, pelayan public, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan lain-lain.
- b. Sebagai sarana aktualisasi peran kementerian, organisasi, dan Lembaga khususnya dalam mengemban peran untuk ikut serta dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

4. Bagi Masyarakat dan Negara

- a. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang lebih maju, dengan kegiatan yang berfokus pada kesejahteraan social, pemberdayaan masyarakat, lingkungan dan pendidikan.
- b. Mempercepat tumbuhnya ide-ide inovasi yang mendorong perubahan social ke arah yang lebih baik.
- c. Terwujudnya jaringan dan kolaborasi yang baik antara mahasiswa, perguruan tinggi, Lembaga pemerintah dan masyarakat.

Mekanisme pelaksanaan bela negara adalah sebagai berikut :

1. Perguruan Tinggi

- a. Menjalani kerja sama dengan mitra seperti kementerian/Lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Lembaga terkait lainnya.
- b. Menyusun rangkaian program, rencana penilaian dan mekanisme pengakuan kredit bersama mitra.
- c. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian, evaluasi terhadap aktivitas.
- d. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama

bela negara.

- e. Menyusun pedoman teknis untuk bela negara.
- f. Memberikan pembekalan tentang kearifan local masyarakat, tata nilai dalam Lembaga pemerintahan, dan perilaku etika selama melaksanakan bela negara.
- g. Melaporkan hasil kegiatan bela negara ke Dirjen Dikti.

2. Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik, mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti bela negara.
- b. Mengisi logbook dan menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.
- c. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 sks maka mahasiswa dapat mengambil mata kuliah daring atau lainnya sesuai ketentuan UPMI.
- d. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada UPMI.

3. Pembimbing

- a. DPA bertanggungjawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- b. Pembimbing pendamping dari Lembaga masyarakat atau unsur pemerintah jika diperlukan.
- c. Dosen pendamping bersama pembimbing melakukan bimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- d. Ketentuan lain akan ditetapkan oleh UPMI.

4. Mitra

- a. Menjalin kerjasama dengan UPMI.
- b. Menyusun rangkaian program, rencana penilaian dan mekanisme pengakuan kegiatan bela negara bersama UPMI.
- c. Melakukan evaluasi aktivitas pelaksanaan bela negara, baik internal maupun bersama-sama dengan UPMI.

Dinamika lapangan kadang menuntut fleksibilitas dan pengembangan dalam pelaksanaan MBKM. Sering ditemukan beberapa aktivitas MBKM menuntut peran aktif mahasiswa dalam spektrum pembelajaran yang lebih luas sehingga menuntut adanya

kombinasi atau perpaduan beberapa BKP MBKM. Missal BKP riset yang bisa dipadukan dengan BKP kewirausahaan. Perpaduan dua BKP ini mampu memberikan pemahaman komprehensif bagi mahasiswa khususnya dalam menciptakan sebuah inovasi yang akan berujung pada hilirisasi produk hasil inovasi. Juga akan memberikan wawasan dan pandangan yang utuh bagi mahasiswa dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks, mengembangkan kemampuan beradaptasi, memperluas wawasan lintas disiplin dan meningkatkan kreativitas serta inovasi mahasiswa.

MBKM kombinasi sendiri bukan merupakan BKP yang spesifik melainkan bentuk program yang menggabungkan dua atau lebih jenis BKP MBKM secara sekuensial (bertahap dan tidak beririsan) dalam sebuah kesatuan program MBKM. Kombinasi-kombinasi BKP ini harus saling terpadu, saling terkait, runut, tidak tumpang tindih (khususnya dalam waktu pelaksanaan) dan mampu memberikan pemahaman serta wawasan yang utuh bagi mahasiswa.

Tujuan BKP MBKM Kombinasi adalah :

1. Mengembangkan kemampuan beradaptasi, memperluas wawasan lintas disiplin dan meningkatkan kreativitas, serta inovasi mahasiswa.
2. Memberikan pengalaman pembelajaran dan spektrum pembelajaran yang luas dan beragam kepada mahasiswa khususnya dalam memahami permasalahan dengan kompleksitas sedang hingga tinggi yang menuntut keterlibatan mahasiswa dalam berbagai wujud sumbangsih atau peran secara bertahap.

2.2.3 Tahap Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi kurikulum dimaknai dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Kegiatan monitoring dimaknai dalam pengertian yaitu:
 - a) sebagai kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dan magang yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di program studi lain di lingkungan UPMI, di luar UPMI, maupun di tempat magang. Data yang telah dikumpulkan menjadi bahan dalam proses evaluasi yang memiliki dampak terhadap lulus dan tidak lulus mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran dan magang;
 - b) sebagai bagian dari rangkaian penjaminan mutu penyelenggaraan program MBKM

yang tanggung jawabnya berada pada petugas monitoring.

- 2) Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
 - a) Program studi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam melakukan monitoring pembelajaran di program studi lain di lingkungan UPMI dan di luar UPMI dan atau di lokasi kegiatan program MBKM.
 - b) Program studi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan Lembaga Pengembangan Pembelajaran Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPPM) UPMI untuk digunakan selama proses monitoring.
 - c) Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan monitoringnya kepada para pihak yang dituju.
 - d) Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain.
 - e) Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua program studi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan evaluasi.
 - f) Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada dekan dan LPPPM UPMI untuk diarsipkan.
- 3) Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
 - a) Program studi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama pembelajaran dan pelaksanaan program MBKM mahasiswa, data hasil monitoring, dan data uji kompetensi, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa.
 - b) Program studi mengusulkan penerbitan surat pengakuan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan program MBKM mahasiswa kepada dekan.
 - c) Hasil penilaian dan surat keterangan pengakuan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada *system edu-edu* oleh dosen pembimbing akademik dan atau dosen pembimbing magang di program studi.
 - d) Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program MBKM yang selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Rektor I bidang Akademik.

2.2.4 Penilaian dan Evaluasi Hasil MBKM

Penilaian/evaluasi merupakan rangkaian dalam meningkatkan kualitas kinerja, dan

produktivitas dalam melaksanakan berbagai kegiatan MBKM focus penilaian/evaluasi ada pada individu dan penyelenggaraan BKP MBKM.

Evaluasi pada Individu:

Digunakan untuk melihat prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan BKP MBKM oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan yang belum dicapai selama mahasiswa mengikuti BKP MBKM. Evaluasi dapat memberi informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa. Selain itu melalui evaluasi dapat dilakukan judgement terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya program akan digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Evaluasi pada Penyelenggara MBKM Mandiri:

Evaluasi pada penyelenggara MBKM mandiri ditekankan pada kinerja penyelenggaraan oleh UPMI dalam melaksanakan MBKM mandiri, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penilaian BKP MBKM. Melalui evaluasi penyelenggaraan ini dapat dilihat kekurangan, hambatan serta praktik baik yang dapat menjadi masukan bagi UPMI untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas MBKM di masa mendatang.

1. Prinsip Penilaian.

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM program hak belajar tiga semester di luar program studi mengacu pada 5 prinsip sesuai dengan SN Dikti yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek-aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM :

- a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan.
- b. Kedisiplinan dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas.
- c. Sikap
- d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas.
- e. Kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan

MBKM, dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan social) sebagai Teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping dari UPMI. UPMi juga membuat system survey on line tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program MBKM yang dijalani. Tujuannya untuk memperoleh umpan balik sebagai sarana evaluasi dan perbaikan yang akan dilakukan oleh UPMI.

2.2.5 Rekognisi dan Pelaporan Hasil MBKM

a. Rekognisi Hasil MBKM

Prinsip rekognisi yang dilaksanakan oleh UPMI didasarkan pada capaian pembelajaran dan jam aktivitas sebagai berikut :

1. Rekognisi dan jam aktivitas. Untuk memperoleh kredit mahasiswa harus memenuhi jumlah jam aktivitas di diperlukan. Misalnya untuk BKP magang, agar bisa diakui 20 sks maka mahasiswa harus melaksanakan keseluruhan kegiatan magang selama 900 jam (1 sks setara dengan 45 jam per semester, $45 \times 20 \text{ sks} = 900 \text{ jam}$) meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan penilaian.
2. Capaian pembelajaran sebagai dasar rekognisi. Rekognisi didasarkan pada capaian luaran pembelajaran yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa harus berkontribusi terhadap capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh prodi yang ada di lingkungan UPMI. Misalnya CPL prodi yang harus dipenuhi adalah kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan bekerja sama dalam tim, maka luaran dan aktivitas BKP MBKM magang dapat dirancang dalam bentuk case method dan/atau team base project.
3. Jam aktivitas sebagai refleksi capaian pembelajaran, yakni jam aktivitas yang dihabiskan dalam suatu BKP MBKM harus mencerminkan tingkat usaha yang diperlukan untuk untuk mencapai capaian pembelajaran yang ditargetkan, sehingga harus ada keseimbangan yang perlu dicapai antara jam aktivitas yang diharapkan dan

tingkat kedalaman capaian pembelajaran. Jika rancangan luaran magang berorientasi HOTS maka aktivitas yang dilakukan seharusnya sama bukagn LOTS.



Gambar 2.17. Relevansi CPL, bentuk Pengakuan MBKM dan Kodifikasi MK
Bentuk rekognisi BKP MBKM dilakukan dalam bentuk :

1. Bentuk Bebas (Free Form)

Penyetaraan dengan mata kuliah yang ada dalam kurikulum. 20 sks dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti BKP MBKM baik dalam hard skill maupun soft skill.

Table 2.7. Contoh Bentuk rekognisi

MK Hardskills	Kredit
Merumuskan masalah keteknikan	3
Menyelesaikan masalah teknis di lapangan	2
Kemampuan sintesa dalam bentuk disain	4
MK Sofskills	
Kemampuan berkomunikasi	3
kerjasama	3
Kepemimpinan	3
kreativitas	3
Kepemimpinan	3
Total	20

2. Bentuk Terstruktur (Structure Form)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang sudah didesain oleh prodi di lingkungan UPMI. Dua puluh (20) sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan BKP MBKM. Missal mahasiswa yang akan mengikuti magang dan capaian pembelajaran relevan dengan CPMK prodi maka peserta magang tersebut dapat melakukan kegiatan magang dan diakui dengan bentuk structure form.

Table 2.8. Contoh Bentuk Terstruktur Rekognisi MBKM

Mata Kuliah	Kredit
Mata kuliah 1 (wajib/pilihan)	3
Mata kuliah 2 (wajib/pilihan)	3
Mata kuliah 3 (wajib/pilihan)	2
Mata kuliah 4 (wajib/pilihan)	2
Praktik Lapangan/Praktik Kerja Lapangan	10
Total	20

3. Bentuk Hibrida

Selain bentuk tersebut, UPMi juga memberikan peluang untuk menerapkan bentuk hibrida yang merupakan gabungan antara free form dan structure form.

Table 2.9. Contoh Bentuk Hibrida Rekognisi MBKM

Matakuliah	Kredit
Mata kuliah 1 (wajib/pilihan)	3
Mata kuliah 2 (wajib/pilihan)	3
Mata kuliah 3 (wajib/pilihan)	3
Mata kuliah 4 (wajib/pilihan)	3
MK Softskills	
Kemampuan berkomunikasi	2
kerjasama	2

Kepemimpinan	2
keativitas	2
Kepemimpinan	2
Total	20

b. Mekanisme Rekognisi dan Pelaporan

Penghargaan atas capaian mahasiswa dalam kegiatan MBKM, rekognisi akan didokumentasikan melalui siakad UPMI pada modul MBKM, selain itu juga akan dicantumkan pada SKPI, dan untuk pelaporan akan dilakukan melalui PD DIKTI. Mekanisme dan pelaporan kegiatan MBKM akan dilakukan dengan beberapa alternative:

Alternatif 1 :

Kegiatan MBKM yang dilakukan oleh mahasiswa UPMI dapat diakui 20 sks secara penuh dengan mata kuliah yang ada dalam kurikulum prodi, dilakukan dengan bentuk struktur menggunakan sejumlah mata kuliah (n-MK) 20 sks prodi dan dilaporkan melalui siakad dan PDDikti UPMI. Sejumlah mata kuliah ini dicantumkan dalam transkrip akademik mahasiswa, sementara informasi pengalaman belajar MBKM dicantumkan dalam SKPI.

Alternatif 2:

Kegiatan MBKM yang dilakukan oleh mahasiswa dapat diakui sebagian dari 20 sks dengan mata kuliah yang ada dalam kurikulum prodi. Rekognisi dilakukan dalam bentuk hybrid menggunakan sejumlah mata kuliah (m-MK) pada prodi X-sks dan sejumlah mata kuliah (s-MK) free form (20-X) sks dan dilaporkan melalui siakad UPMI dan PDDikti. Sejumlah mata kuliah hasil rekognisi tersebut dicantumkan dalam transkrip akademik mahasiswa, sementara informasi pengalaman belajar MBKM dicantumkan dalam SKPI.

Alternative 3:

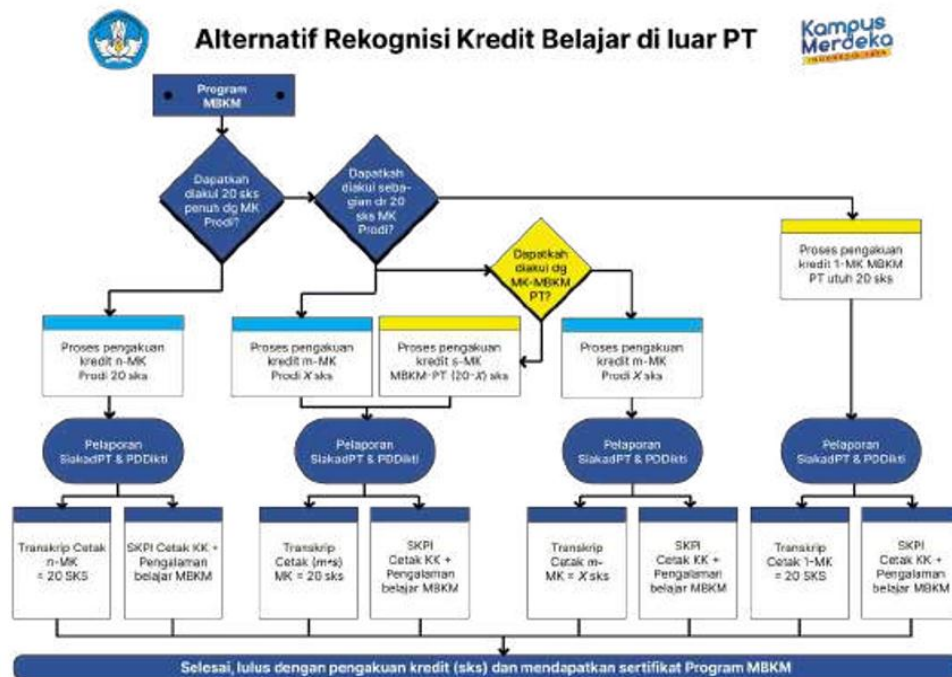
Kegiatan MBKM yang dilakukan mahasiswa dapat diakui sebagian dari 20 sks dengan mata kuliah yang ada pada kurikulum prodi namun tidak tersedia mata kuliah free form di UPMI. Rekognisi dapat dilakukan dengan bentuk terstruktur hanya menggunakan

sejumlah mata kuliah (m-MK) prodi X sks (kurang dari 20 sks) dan dilaporkan melalui siakad UPMI dan PDDikti. Sejumlah mata kuliah hasil rekognisi tersebut dicantumkan dalam transkrip akademik mahasiswa, sementara informasi pengalaman belajar MBKM dicantumkan dalam SKPI.

Alternatif 4:

Kegiatan MBKM mahasiswa dapat diakui penuh 20 sks namun tidak menggunakan mata kuliah yang ada dalam kurikulum prodi. Rekognisi dilakukan dengan bentuk free form atau jika tidak tersedia mata kuliah free for di universitas (UPMI) dapat diakui dengan nama MBKM (misal MSIB, MK Proyek desa, MK Proyek Kemanusiaan, sejumlah 20 sks) dan dilaporkan melalui siakad UPMI dan PDDikti. Sejumlah mata kuliah hasil rekognisi tersebut dicantumkan dalam transkrip akademik mahasiswa, ,sementara informasi pengalaman belajar MBKM dicantumkan dalam SKPI.

Diagram alir rekognisi MBKM dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2.18. Alternative Rekognisi Kredit Belajar di Luar PT

BAB III
STANDAR MUTU PENYELENGGARAAN MBKM
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA Alamat: Jalan Seroja No. 57, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Telp. 08113888814 Surel: info@mahadewa.ac.id Website : www.mahadewa.ac.id	Kode/Nomor: SPMI- 01/M/BPM-UD
		Tanggal: 5 Agustus 2024
	STANDAR MUTU PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	Revisi: -

3.1 Standar Mutu Akademik Penyelenggaraan MBKM Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

- (1) Merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik lembaga dan civitas akademik di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- (2) Merupakan landasan umum bagi pengembangan program akademik, sumber daya akademik, prosedur kegiatan akademik, dan evaluasi akademik kegiatan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM).
- (3) Merupakan acuan bagi setiap fakultas/program studi di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk mengembangkan Standar akademik MBKM secara spesifik sesuai dengan karakternya.

1. Kebijakan dan Manual Mutu

NO.	PARAMETER MUTU	INDIKATOR
1.	Kebijakan	1) Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang mengatur tentang hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi dilaksanakan oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana tangguh dan relevan dengan kebutuhan zaman. 2) Bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih kegiatan pembelajaran yang diambil; 3) Merupakan wujud pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 4) Kebijakan mutu yang diambil oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah dibuat terintegrasi dengan pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, karena Universitas PGRI Mahadewa Indonesia telah memiliki Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar
2.	Manual Pelaksanaan	1) Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka harus sesuai dengan kriteria minimal yang tertuang pada Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus yang berlaku di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia: 2) Kriteria mutu lainnya dapat ditambahkan dan/atau ditingkatkan oleh masing-masing fakultas dan program studi, sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan;

		3) Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan sesuai dengan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
--	--	--

2. Standar Manual Mutu

NO.	PARAMETER MUTU	INDIKATOR
1.	Kompetensi Peserta	a) kompetensi sikap peserta yaitu peserta memiliki perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran; b) Pengetahuan peserta yaitu peserta menguasai konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran; c) keterampilan umum peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara umum; d) keterampilan khusus peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori,

		metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara khusus.
2.	Pelaksanaan Kegiatan	a) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; b) Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; c) Program studi sebagai pelaksana kegiatan wajib: • Menyusun/menyesuaikan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah/kegiatan, • Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
3.	Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal	a) Dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, proses pembimbingan internal dan eksternal harus berjalan efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah/kegiatan untuk mencapai kemampuan yang ditetapkan dalam mata kuliah/kegiatan. b) Penugasan pembimbing internal dan eksternal berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman
4.	Sarana dan Prasarana Untuk Pelaksanaan	a) Sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran; b) Pelaksana kegiatan (program studi) memiliki sarana dan prasarana yang minimal relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PKM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI; c) Memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi dan untuk layanan proses pembelajaran, penelitian dan PKM

5.	Pelaporan dan Presentasi Hasil	a) Pelaporan dan presentasi hasil belajar/kegiatan dapat dilakukan dengan unjuk kerja; b) Unjuk kerja dapat berupa tugas, portofolio atau karya desain, pratikum dan lain-lain; c) Pelaporan dan presentasi hasil dinilai dengan instrument penilaian yang terdiri dari atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut: • Instrumen penilaian terdiri atas penialian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain; • Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi; • Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian; • Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%; • Penilaian sikap memiliki bobot antara 25 - 40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap.
6.	Penilaian	a) Dilakukan oleh dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/ pembimbing; b) Dilakukan oleh dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing dengan mengikutsertakan mahasiswa;dan/atau c) Dilakukan oleh dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing dengan mengikutsertakan pembimbing/penilai eksternal yang mempunyai kompetensi

		yang memadai; d) Penilaian pembelajaran/kegiatan mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi: • Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. • Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. • Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. • Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. • Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. e) Aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya mencakup: • Kehadiran dalam setiap kegiatan • Kedisiplinan dalam mengikuti setiap kegiatan • Partisipasi dalam setiap kegiatan • Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas • Kemampuan kerjasama
--	--	---

		• Kemampuan komunikasi • Kemampuan melaksanakan tugas • Kemampuan membuat laporan • Sopan santun f) Hasil penilaian yang dilakukan sesuai dengan bentuk pembelajaran/kegiatan yang diambil oleh mahasiswa, selanjutnya oleh Program Studi dan Fakultas melakukan konversi nilai dan pengakuan sks terhadap hasil penilaian tersebut serta menginput ke dalam SIAKAD UPMI. g) Hasil penilaian dan pengakuan sks sebagai rekognisi kegiatan MBKM dilaporkan ke Pangkalan Data DIKTI (PD-Dikti)
--	--	---

3.2 Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi kurikulum dimaknai dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan monitoring dimaknai dalam tiga pengertian yaitu:
 - a. Sebagai kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dan magang yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di prodi lain di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, dan di luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, maupun di tempat magang. Data yang telah dikumpulkan menjadi bahan dalam proses evaluasi yang memiliki dampak terhadap lulus dan tidak lulusnya mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran dan magang;
 - b. Sebagai kegiatan supervisi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama proses pembelajaran maupun magang;
 - c. Sebagai bagian dari rangkaian penjaminan mutu penyelenggaraan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang tanggung jawabnya berada pada petugas monitoring.
2. Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
 - a. Ketua Program Studi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk mendapatkan surat penugasan melakukan monitoring pembelajaran di program studi

lain di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan di luar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan atau di lokasi kegiatan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

- b. Ketua Program Studi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan Kepala Biro Magang/PPL/KP bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk digunakan selama proses monitoring.
 - c. Dosen Pendamping sesuai tupoksinya melakukan komunikasi dengan pihak sekolah dan atau lokasi Magang/ PPL/ KP maupun lokasi kegiatan proyek di desaseperti program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa (Kemdikbud) mengenai rencana kunjungan monitoring nya kepada para pihak yang dituju.
 - d. Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain.
 - e. Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua program studi untuk di Analisa dan digunakan dalam kegiatan evaluasi.
 - f. Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada Kepala Biro Magang/PPL/KP selanjutnya dilaporkan kepada dekan cq. Wakil Dekan Bidang Akademik dan kemahasiswaan
3. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
- a. Ketua Program Studi menganalisa seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama pembelajaran dan pelaksanaan program MBKM mahasiswa, data hasil monitoring, dan data uji kompetensi, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa.
 - b. Ketua Program Studi mengusulkan kepada dekan untuk menerbitkan surat pengakuan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan program yang dilakukan mahasiswa dalam kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
 - c. Hasil penilaian dan surat keterangan pengakuan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada sistem edu-edu oleh dosen pembimbing akademik dan atau dosen pembimbing magang di program studi.
 - d. Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Monitoring dan Evaluasi

NO	PARAMETER MUTU	INDIKATOR
1	Eksistensi dokumen	a. Guna memastikan program MBKM dapat berjalandengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan perlu dilakukan kegiatan Monitoring danEvaluasi (Monev) terhadap implementasinya; b. Kegiatan Monev dilakukan secara komprehensif meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian; c. Kegiatan Monev dilaksanakan oleh Tim Monev di bawah koordinasi Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
2	Tujuan	a. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan program MBKM telahsesuai dengan rencana. b. Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi program MBKM agar langsung dapat diatasi. c. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam implementasi program MBKM sudah tepat untuk mencapai tujuan program. d. Menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan lingkungan dinamis, tanpa menyimpang dari tujuan.
3	Kegiatan Monev	Kegiatan Monev Program MBKM dilakukan melaluitahapan: a. Membentuk Tim Monev sesuai dengan lingkupkegiatan yang akan dipantau dan dinilai; b. Menetapkan standar mutu dan kriteria yang akandiukur capainnya; c. Mengembangkan instrument monev; d. Mengukur tingkat capaian standar mutu terhadapkriteria yang ditetapkan; e. Menilai tingkat capaian standar mutu; f. Pelaporan Monev

BAB IV

PENUTUP

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagai suatu kebijakan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sehingga Bagi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang senantiasa melakukan pembaharuan dalam kegiatan pendidikan untuk dapat memenuhi tuntutan *stakeholders* maka kehadiran kebijakan ini sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan. Sangat diakui masalah keberhasilan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia tentunya menuntut adanya dukungan dan partisipasi aktif, tidak hanya dari masing-masing program studi, tetapi juga dari dukungan dan partisipasi aktif setiap unit kerja yang ada sertaseluruh *stakeholders* yang sangat kondusif akan ketercapaian visi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Oleh karena itu, berbagai persiapan dan penyempurnaan harus terus dilakukan, di antaranya terkait dengan hal-hal sebagai berikut.

1. Melakukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*) terhadap keberadaan program studi di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, sehingga dapat mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing program studi, baik dari sisi program maupun SDM, untuk mendukung, menyediakan, dan menawarkan Program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka kepada pihak internal Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan pihak *stakeholder* Eksternal
2. Mempertimbangkan keberlangsungan dan kelancaran pelaksanaan berbagai program dan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, maka untuk memenuhi kepuasan stakeholder internal dan eksternal perlu senantiasa diupayakan peningkatan akses pembelajaran dalam jaringan (daring) secara sistemik dengan mengakomodasi berbagai kepentingan kegiatan belajar dengan menggunakan berbagai aplikasi sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah dan pendamping serta pembimbing berbagai jenis program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
3. Mengembangkan dan menyempurnakan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan magang, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait,

penjaminan mutu magang, penugasan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan berserta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

4. Mengembangkan, meningkatkan dan menindaklanjuti berbagai kerjasama yang telah terjalin dan memperluasnya dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, baik dengan perguruan tinggi mitra maupun dengan instansi ataupun dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Dengan memahami maksud dan tujuan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), maka panduan ini bertujuan sebagai acuan bagi unit-unit terkait, seperti prodi, fakultas, Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dan unit pelaksana lainnya dalam melakukan pengembangan, implementasi dan monitoring Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Panduan ini pun digunakan sebagai payung hukum untuk menjamin dan menguatkan pelaksanaan program dan aktivitas Merdeka Belajaran Kampus Merdeka di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

Demikian buku pedoman pelaksanaan MBKM Universitas PGRI Mahadewa Indonesiaini disusun, semoga bermanfaat bagi perguruan tinggi dan dapat digunakan sebagai salah satuacuan pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dengan harapan perguruan tinggi dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). (2023). Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE). Jakarta: BAN-PT
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2024. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT). Jakarta
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. 2024. Buku Panduan Merdeka Belajar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Tahun 2024. Jakarta: Kemendikbudristek
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Jakarta
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan
- Peraturan Menteri Kebudayaan, Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Nomor 1132/UPMI/VII/2024 tentang Penetapan Kurikulum Outcome Based Education Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 2024
- Surat Keputusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali Nomor 024/YP LP-PT/IKIP PGRI Bali/V/2024 tentang Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia